



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 – 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG, adalah dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi untuk periode 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2021 – 2024.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-PG adalah sebagai panduan, arahan, dan acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 3

Ruang lingkup RAD-PG meliputi institusi pemerintah, organisasi nonpemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pasal 4

Tujuan RAD-PG adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemahaman kepada baik masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan terkait dalam peran serta guna perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi;
- b. meningkatkan kemampuan analisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar:
 1. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi;
 2. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan
 4. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.

- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrase, dan koordinasi yang baik;
- d. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yakni mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan baik di tingkat Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi di DIY; dan
- f. sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RAD-PG.

Pasal 5

Rincian RAD-PG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan RAD-PG dibentuk Forum Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 119

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2021

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

2021 – 2024

KATA PENGANTAR

Ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting dalam pembangunan DIY. Keberhasilan ketahanan pangan dan gizi di DIY sebagai wilayah yang secara agregat surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu pemerintah DIY terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan dan gizi, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Buku Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) DIY 2020-2024 ini merupakan penajaman operasional dari RPJMN, RPJMD DIY, SDGs, serta perencanaan pembangunan pangan dan gizi lain. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (*integrated*) lintas-sektor, bertahap dan berkesinambungan (*sustainable*), serta terukur keberhasilannya (*measureable*). Dokumen ini merupakan panduan, arahan serta acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi bagi institusi pemerintah, perguruan tinggi/litbang, organisasi non-pemerintah, institusi masyarakat, dunia usaha, dan pelaku lain baik pada tataran provinsi maupun kabupaten dan kota.

Saya berharap RAD-PG ini agar segera ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata di seluruh instansi provinsi maupun kabupaten dan kota. Marilah kita bersama berperan meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas di DIY.

Akhirul kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mempersiapkan, membahas, memberikan pemikiran, dan kerja kerasnya dalam penyusunan dokumen RAD-PG DIY 2020-2024 ini.

Yogyakarta,

**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta,**



Hamengku Buwono X

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	2
C.	Tujuan Penyusunan.....	2
D.	Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG	3
II.	ANALISIS SITUASI	4
A.	Situasi Saat Ini.....	4
B.	Hambatan/Permasalahan	37
C.	Tantangan.....	39
D.	Telaah Kebijakan Provinsi	39
III.	RENCANA AKSI MULTI SEKTOR	42
A.	Tujuan dan Sasaran (outcome).....	42
B.	Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.....	43
IV.	KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI.....	46
A.	Strategi Dan Aksi.....	46
B.	Pengorganisasian.....	52
C.	Peran Sektor Non-Pemerintah (Swasta dan Lembaga Masyarakat).....	52
D.	Pembiayaan.....	53
V.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	54
A.	Pemantauan dan Evaluasi.....	54
B.	Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	54
C.	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi	54
	DAFTAR PUSTAKA	55

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan perkembangan, saat ini ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multisektor. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Meskipun fokus pada 1000 HPK, perbaikan pangan dan gizi pada periode selanjutnya tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan kekurangan gizi pada usia bayi dan balita mengakibatkan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik, meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular saat dewasa dan lansia, serta berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

DIY mempunyai angka pertumbuhan ekonomi yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional selama lima tahun terakhir. Nilai Indeks Pembangunan Manusia DIY juga merupakan tertinggi kedua di tingkat nasional. Di sisi lain, tingkat kemiskinan DIY masih lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Indeks Gini juga merupakan yang tertinggi di Indonesia, sehingga ketimpangan pendapatan antara kelompok berpendapatan terendah dan tertinggi di DIY relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah DIY terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi DIY secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi sebagai panduan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 63 ayat (3) menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun". RAD 2020-2024 disusun dengan pendekatan multisektor berdasarkan arah

kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Visi Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RAD-PG 2020-2024 ini merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di DIY.

B. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan pusat dan daerah, maka kedudukan RAD-PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2020-2024 di Pusat. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2020-2024 dan juga RPJMD di daerah. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya dalam aspek pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan umum dari penyusunan ini sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di DIY.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen RAD-PG tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di provinsi DIY dan pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi di DIY.
6. Sebagai panduan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RAD-PG

D. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 142 ayat (5) yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya pasal 1 ayat (1) yang mengatur ketahanan pangan dan gizi serta Pasal 37 (ayat 1) yang mengatur tentang perbaikan Status Gizi masyarakat.
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022.

II. ANALISIS SITUASI

A. Situasi Saat Ini

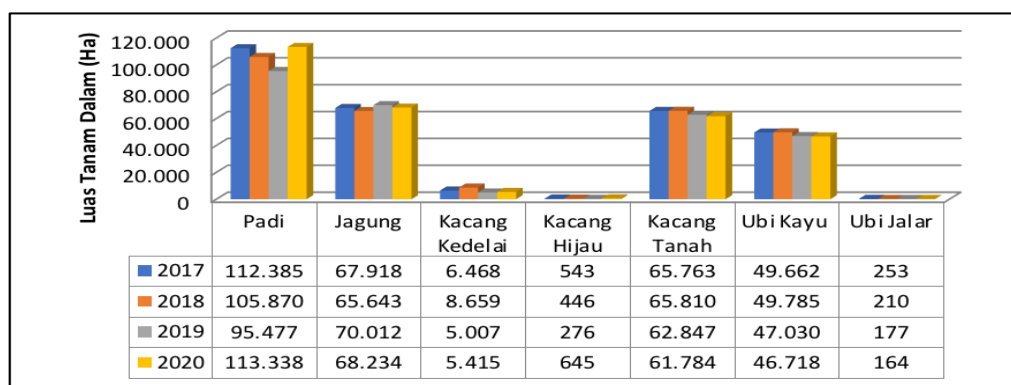
A.1. Situasi Pangan

Kebutuhan pokok manusia terdiri atas tiga bagian yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan pangan. Pangan merupakan jenis kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

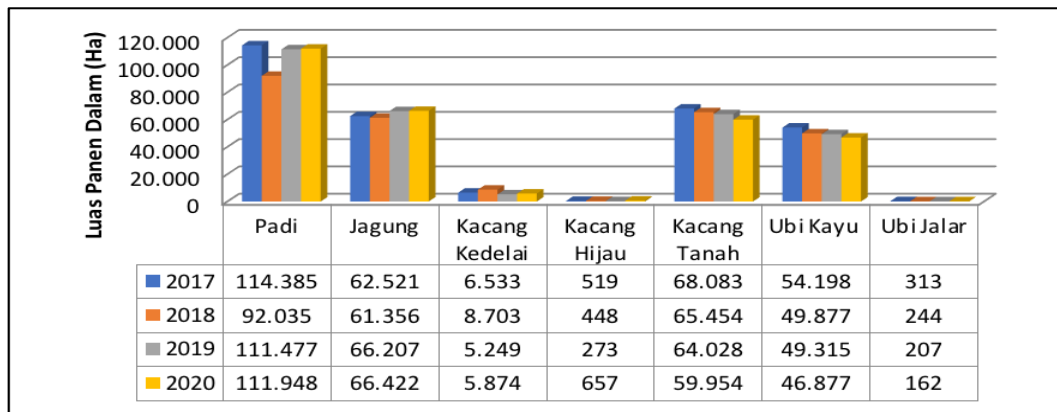
Pangan merupakan kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia, sehingga ketersediaan, distribusi, dan akses pangan serta tingkat harga sangat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah (tingkat daerah/nasional). Bahan pangan yang cukup dan bergizi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

1. Ketersediaan pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, keterbatasan lahan pertanian dan dampak *global warming* akan mempengaruhi masa tanam dan bahkan akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas lahan. Produksi tanaman pangan di DIY menjadi hal paling penting untuk diperhatikan karena menyangkut bahan makanan pokok masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Pemantauan produksi tanaman pangan dilakukan pada tanaman sumber karbohidrat dan protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, antara lain: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Di samping itu bahan pangan strategis meliputi: telur, daging sapi, daging ayam, gula pasir, minyak goreng, cabai merah, dan bawang merah. Ubi kayu (1.073.314 ton), padi (534.347 ton) dan jagung (369.347 ton) merupakan hasil produksi tanaman pangan terbanyak di DIY pada tahun 2020, hingga mencapai lebih dari 600.000 ton. Produksi tanaman pangan paling rendah di DIY pada tahun 2020 adalah ubi jalar (2.765 ton) sebagai sumber karbohidrat dan kedelai (7.969 ton) sebagai sumber protein.

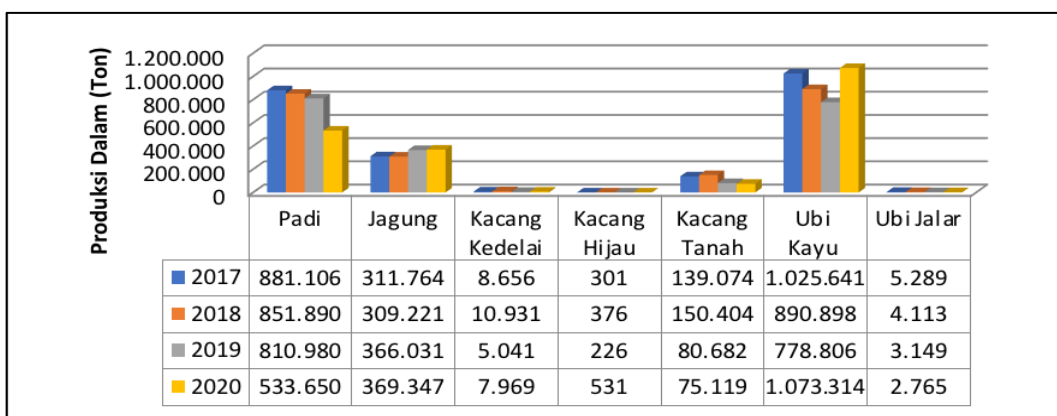


Gambar 1. Luas Tanam Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017 sd 2020
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021



Gambar 2. Luas Panen Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017 sd 2020

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021



Gambar 3. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017 sd 2020

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Hasil analisis ketersediaan pangan dengan memperhatikan tingkat produksi menunjukkan bahwa beberapa komoditas pangan di DIY yang masih bergantung pada impor dari luar wilayah DIY untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga penduduk DIY. Beberapa komoditas yang ketersediaannya masih bergantung pada impor yaitu kedelai, kacang hijau, ubi jalar, sayur, gula, daging sapi, daging ayam, telur, susu, minyak goreng, tepung gandum, dan bawang putih. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Analisis Surplus Minus Tanaman Pangan dan Gula Pasir di DIY Tahun 2020

No	Keterangan	Beras	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Gula Pasir
1	Produksi (Ton)	534.837,7	369.347,0	1.073.314,0	2.765,0	7.969,0	75.119,0	531,0	24.049,0
2	Konsumsi Rumah Tangga (Kg/Kap/ Tahun)	83,4	0,8	7,2	1,8	8,8	0,4	0,4	8,1
	Konsumsi Rumah	228,5	2,2	19,7	4,9	24,1	1,1	1,1	22,2

No	Keterangan	Beras	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Gula Pasir
	Tangga (g/Kap/hr)								
3	Konsumsi (Ton)	320.497,9	3.074,3	27.668,9	6.917,2	33.817,5	1.537,2	1.537,2	31.127,5
4	Surplus/ minus (Ton)	214.339,9	366.272,7	1.045.645,1	(4.152,2)	(25.848,5)	73.581,8	(1.006,2)	(7.078,5)
5	Penyediaan Dalam Negeri (Ton) (+ Impor dan Ekspor)	550.304,0	367.392,0	772.641,0	36.076,0	66.199,0	66.199,0	8.868,0	4.929,0
6	Surplus/ minus (Ton)	229.806,1	364.317,7	744.972,1	29.158,8	32.381,5	64.661,8	7.330,8	(26.198,5)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

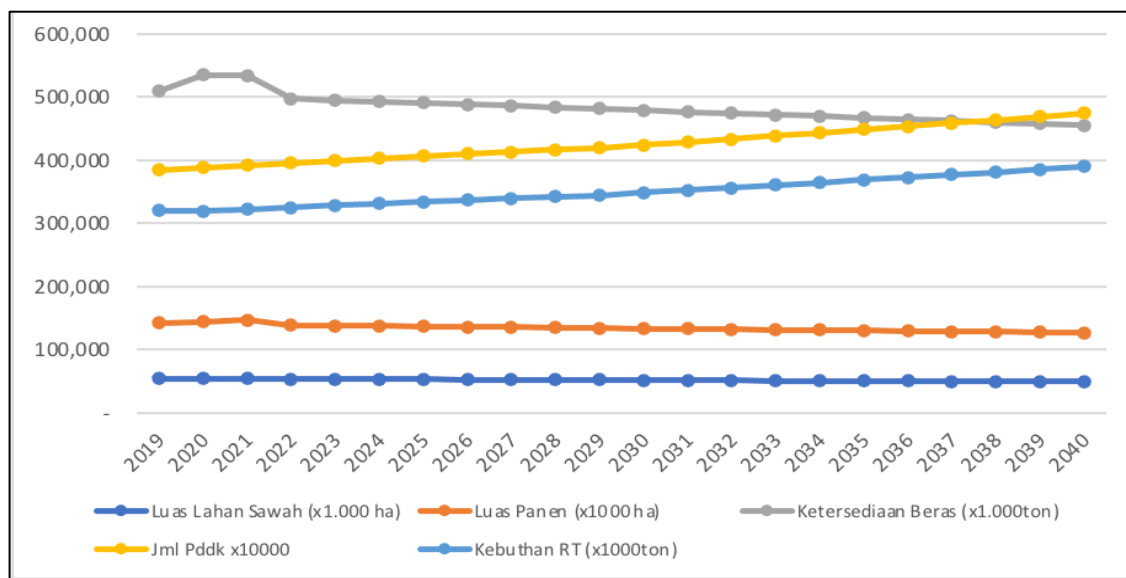
Tabel 4. Analisis Surplus Minus Pangan Hewani, Sayur, dan Buah di DIY Tahun 2020

No	Keterangan	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur	Susu	Ikan	Sayur	Buah - buahan
1	Produksi (Ton)	5.623,0	19.965,0	27.296,0	5.926,0	115.913,0	90.402,0	245.346,0
2	Konsumsi Rumah Tangga (Kg/Kap/Tahun)	6,6	9,9	8,1	3,8	12,0	58,1	37,3
	Konsumsi Rumah Tangga (g/Kap/hr)	18,1	27,1	22,2	10,4	32,9	159,2	102,2
3	Konsumsi (Ton)	25.363,1	38.044,7	31.127,5	14.603,0	46.114,8	223.272,5	143.340,2
4	Surplus/ minus (Ton)	(19.740,1)	(18.079,7)	(3.831,5)	(8.677,0)	69.798,2	(132.870,5)	102.005,8
5	Penyediaan Dalam Negeri (Ton) (+ Impor dan Ekspor)	34.146,0	47.805,0	39.016,0	34.413,0	131.007,0	257.112,0	285.478,0
6	Surplus/ minus (Ton)	8.782,9	9.760,3	7.888,5	19.810,0	84.892,2	33.839,5	142.137,8

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Walaupun ketersediaan pangan di DIY dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri maupun dari impor, namun proyeksi ketersediaan pangan DIY (khususnya beras) berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2019 menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk DIY yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan di tahun 2020-2040 (Gambar 4). Hal ini dikarenakan semakin menyusutnya luas lahan pertanian DIY akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak

ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen.

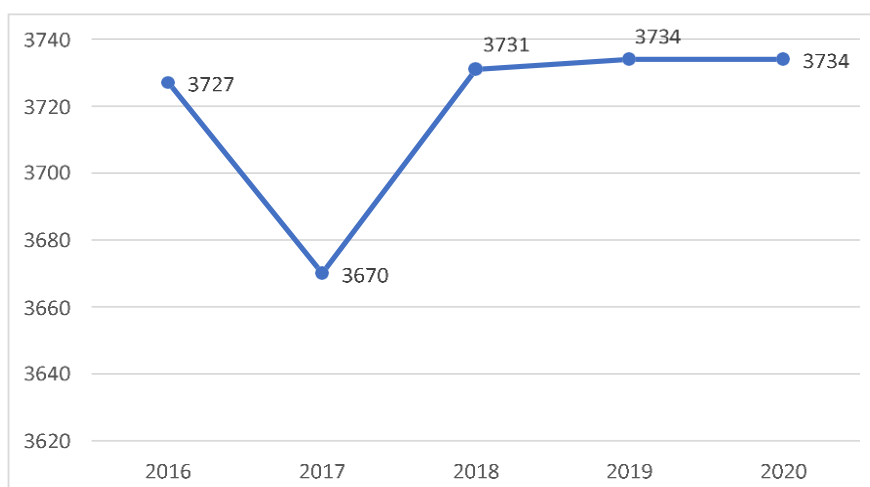


Gambar 4. Perkembangan Luas Lahan, Luas Panen, Produktivitas Beras DIY Tahun 2019 dan Proyeksinya hingga Tahun 2040

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Sementara itu, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2016-2020, lahan sawah DIY mengalami penurunan dari 55.292 ha menjadi 52.014,7 ha (rata-rata 819,3 ha/tahun). Tantangan ke depan yang harus dijawab adalah bagaimana lahan produktif yang masih ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan arif agar tidak berkurang fungsi dan kemanfaatannya. Upaya perlindungan lahan pertanian juga belum didukung dengan langkah penetapan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kabupaten.

Persyaratan standar ketersediaan pangan yang ditetapkan oleh FAO terdiri dari ketersediaan energi minimal 2400 Kkal/kapita/hari. Adapun ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2020 sebesar 3.734 Kal/kapita/hari. Mengacu pada hal tersebut, maka ketersediaan energi DIY dapat dikatakan telah jauh melebihi standar yang ditetapkan.



Gambar 5. Perkembangan Ketersediaan Energi DIY (KKal/kap/hari) Tahun 2016 s/d 2020

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

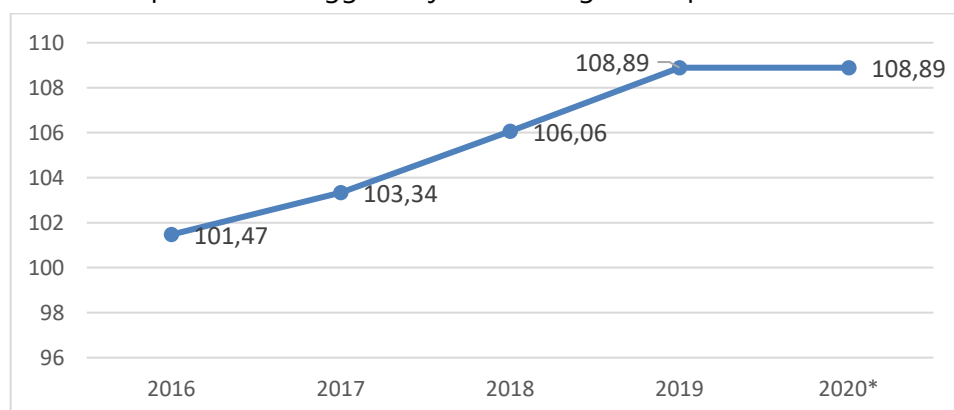
Walaupun tingkat ketersediaan energi DIY telah melampaui nilai standar, namun secara khusus jika mencermati Tabel 5, tampak bahwa belum semua kelompok pangan sesuai dengan proporsi ideal. Proporsi ketersediaan energi pada tahun 2019 untuk kelompok padi-padian sebesar 76,4% artinya sudah melebihi proporsi ideal, demikian juga dengan kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, dan gula. Sementara kelompok pangan yang proporsi ketersediaan energi masih pada posisi di bawah ideal adalah kelompok pangan hewani serta kelompok sayur dan buah. Proporsi ketersediaan energi yang belum ideal ini mengindikasikan adanya korelasi positif dengan keberagaman konsumsi penduduk DIY.

Tabel 5. Ketersediaan dan Tingkat Ketersediaan Energi DIY, 2019

Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (Kal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%AKE)	Proporsi Ideal (%)
Padi-padian	1.833	76,4	50
Umbi-umbian	219	9,1	6
Pangan hewani	280	11,7	12
Minyak dan lemak	579	24,1	10
Buah/biji berminyak	83	3,5	3
Kacang-kacangan	331	13,8	5
Gula	299	12,5	5
Sayur dan Buah	110	4,6	6
Lain-lain	0	0	3
Total	3.734	156	

Sumber: Neraca Bahan Makanan (NBM) 2019 Tetap, DPKP DIY

Ketersediaan protein di DIY selama 2016-2020 menunjukkan angka yang terus meningkat. Ketersediaan protein pada tahun 2016 sebesar 101,47 gram/kap/hr dan pada tahun 2019 mencapai titik tertinggi menjadi 108,89 gram/kap/hr.



Gambar 6. Perkembangan Ketersediaan Protein DIY (gr/kap/hari) Tahun 2016 s/d 2020

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

2. Distribusi Pangan

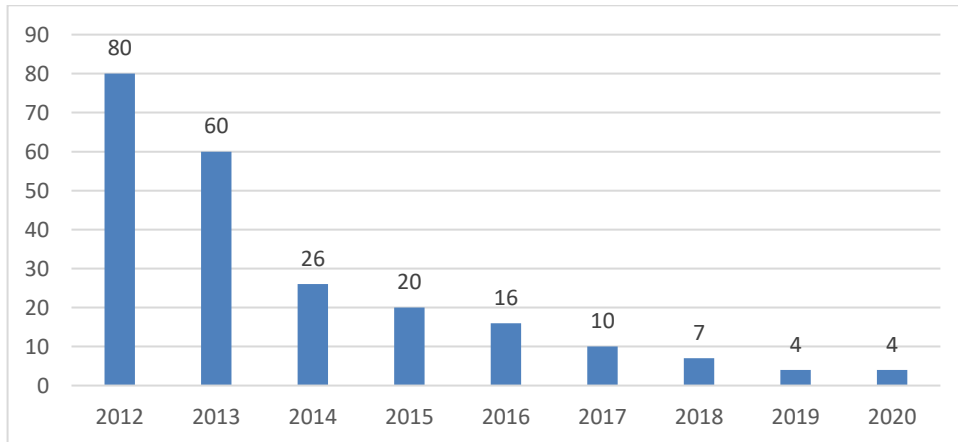
Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera dapat disalurkan sesuai sasaran yang ditetapkan.

Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu /gaplek, serta 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

Ukuran yang banyak digunakan untuk akses pangan adalah kerawanan pangan masyarakat. Tingkat rawan pangan masyarakat di DIY khususnya penduduk rawan berat (<70% AKE) pada tahun 2014 sebesar 40,9%. Sedangkan persentase desa rawan pangan di DIY pada tahun 2020 sekitar 4 desa dari 393 desa (1,02%).

Tingkat kerawanan pangan yang dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan di DIY berada dalam kategori sedang. Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 20 desa pada tahun 2015, menjadi 4 desa rawan pangan pada tahun 2020 yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo 3 desa (Kalirejo, Banjarsari, dan Kebonharjo), dan Kabupaten Gunungkidul 1 desa (Tegalrejo).

Desa rawan pangan di DIY sebagian besar disebabkan oleh aspek akses pangan yang terkait erat dengan kemiskinan. Permasalahan ini harus dipecahkan secara bertahap melalui usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan karena hal tersebut merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akses pangan menuju gizi yang cukup untuk hidup sehat. Kelompok miskin inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Berbagai intervensi kegiatan telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan, diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan keuangan desa, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Gambar 7. Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2012-2020
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

3. Konsumsi pangan

Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum, karena pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Pemenuhan kecukupan pangan perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan, dan dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau harganya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) sebagai upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal telah disepakati. Keragaman konsumsi pangan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kecukupan pangan dan gizi. Diversifikasi konsumsi pangan sangat berperan dalam kaitannya dengan aspek gizi, kesehatan dan lebih jauh akan mempengaruhi kualitas SDM, baik menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan maupun produktivitas kerja. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional.

Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup: (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Tabel 6 menyajikan data bahwa pada tahun 2020 PPH konsumsi di DIY sudah di atas target konsumsi, yakni sebesar 94,7. Namun realitasnya untuk komoditas umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah masih belum mencapai

AKE yang ideal. Sementara untuk komoditas pangan padi-padian, pangan hewani, serta minyak dan lemak telah melampaui skor AKE ideal.

Tabel 6. Kinerja PPH Konsumsi pangan DIY Tahun 2019

No.	Kelompok Pangan	Kalori	%	% AKG	Bobot	Skor	Skor	Skor	Skor
						Aktual	AKG	PPH	Makmimum
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Padi - padian	1,240	56.4	59.0	0.5	28.2	29.5	25.0 *	25.0
2	Umbi - umbian	35	1.6	1.7	0.5	0.8	0.8	0.8	2.5
3	Pangan hewani	309	14.1	14.7	2.0	28.1	29.4	24.0 *	24.0
4	Minyak dan Lemak	219	9.9	10.4	0.5	5.0	5.2	5.0 *	5.0
5	Buah/ biji berminyak	29	1.3	1.4	0.5	0.7	0.7	0.7 *	1.0
6	Kacang - kacang	66	3.0	3.1	2.0	6.0	6.3	6.3	10.0
7	Gula	112	5.1	5.3	0.5	2.5	2.7	2.5 *	2.5
8	Sayur dan buah	140	6.4	6.7	5.0	31.8	33.3	30.0 *	30.0
9	Lain - lain	50	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Jumlah	2,199	100.0	104.7		103.1	108.0	94.3	100.0

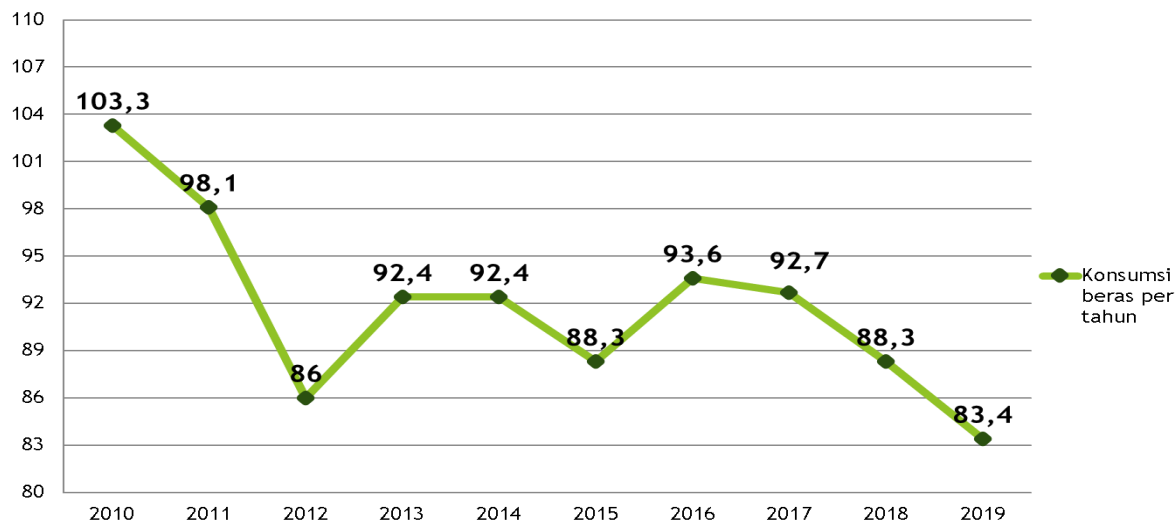
Sumber data : BPS DIY

Keterangan :

- c** : Angka konsumsi energi kelompok pangan (kcal/kap/hr)
- d** : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap total konsumsi energi
- e** : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap AKG (2.000 kcal/kap/hr)
- g** : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap total konsumsi energi dikalikan bobot
- h** : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap AKG dikalikan bobot
- i** : Skor PPH, bila skornya lebih tinggi atau = skor maksimum digunakan skor maksimum tersebut
- *** : Sama dengan skor maksimum

Jumlah konsumsi energi penduduk DIY cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.199 KKal/kapita/hari, sudah berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 KKal/kapita/hari. Karbohidrat tetap mendominasi asupan kalori sebagian besar penduduk DIY. Menurut BPS DIY (2019), rata-rata konsumsi karbohidrat, yakni berasal dari kelompok pangan padi-padian sebesar 1.240 KKal/Kap/Hari dan umbi-umbian sebesar 35 KKal/Kap/Hari.

Lebih lanjut DPKP DIY (2020) melaporkan bahwa konsumsi beras per kapita per tahun tampak menurun dari 103,3 kg/kap/tahun di tahun 2010 menjadi 83,4 kg/Kap/Tahun di tahun 2019 (Gambar 8).



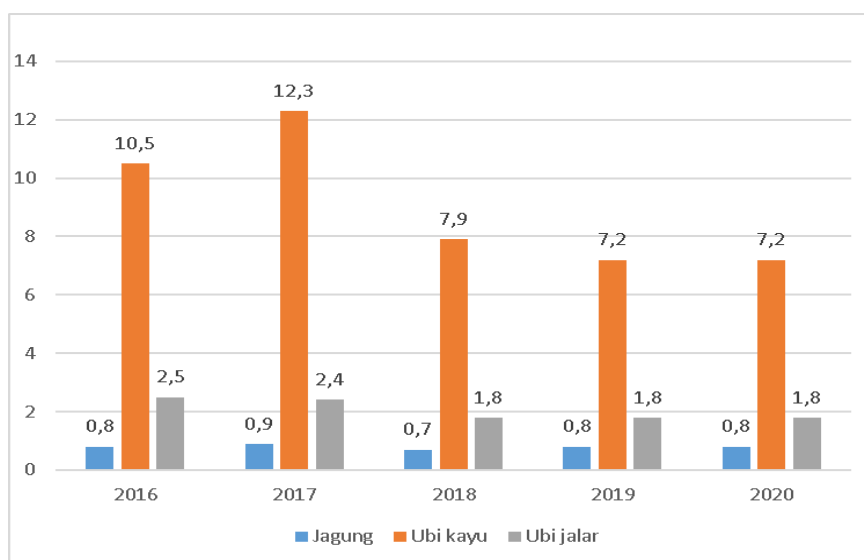
Gambar 8. Kinerja konsumsi beras di DIY Tahun 2010-2019 (kg/kap/tahun)

(Sumber: DPKP DIY, 2020)

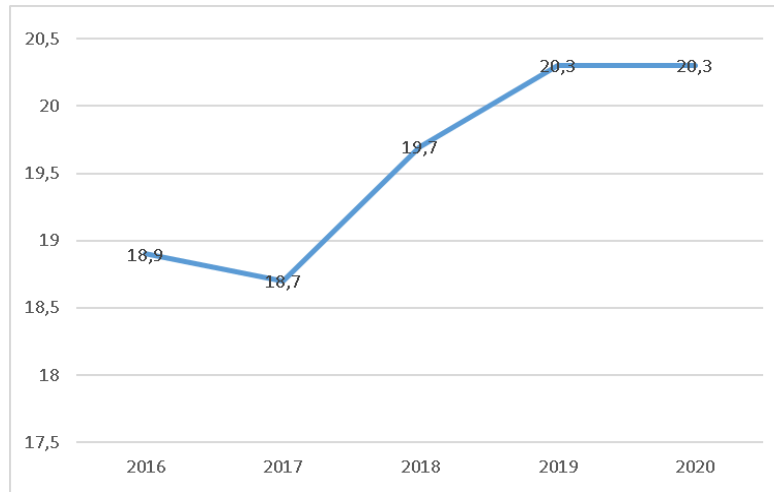
Jika dibandingkan dengan PGS yang menyatakan bahwa anjuran konsumsi 3-4 porsi, maka anjuran harian konsumsi beras adalah sebanyak 300-400 gram. Apabila dibandingkan dengan angka kecukupan gizi untuk Karbohidrat, maka konsumsi yang dianjurkan sebanyak 415 gram untuk dewasa laki-laki dan 340 gram untuk perempuan. Konsumsi per kapita untuk beras memang masih di bawah anjuran PGS, namun masih terdapat kebiasaan mengonsumsi selingan berbahan dasar tepung menjadi penambahan jumlah asupan harian. Konsumsi gula yang mencapai hampir 30 gram atau 3 sendok makan juga dapat menjadi perhatian mengingat batas konsumsi maksimal adalah 4 sendok makan setiap hari.

Konsumsi bahan makanan pokok selain beras, yakni gandum, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kentang merupakan indikasi bahwa masyarakat di DIY tidak hanya terbatas mengonsumsi nasi (beras). Hal tersebut menunjukkan potensi bahwa masyarakat di DIY dapat mengonsumsi beraneka ragam makanan, karena Prinsip Gizi Seimbang adalah makan yang beranekaragam. Tidak ada makanan atau bahan pangan yang sempurna, semuanya saling melengkapi.

Namun demikian, konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (jagung, ubi kayu, ubi jalar) pada kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun, sementara konsumsi terigu meningkat. Selengkapnya tersaji pada Gambar 9 dan 10. Tampak bahwa peningkatan konsumsi terigu berpotensi menjadi penyebab terhambatnya upaya diversifikasi pangan memanfaatkan sumberdaya pangan lokal.



Gambar 9. Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat Non Beras di DIY (kg/kap/tahun)
(Sumber: DPKP DIY, 2020)



Gambar 10. Konsumsi Terigu di DIY ((kg/kap/tahun)
(Sumber: DPKP DIY, 2020)

Secara umum, konsumsi energi perkapita sehari penduduk di wilayah perdesaan DIY sampai dengan tahun 2018 selalu lebih rendah dari konsumsi energi penduduk perkotaan, kecuali di tahun 2015. Konsumsi energi perkapita penduduk perkotaan selama 2019 tercatat sebesar 2.231 kkal sehari. Sementara, konsumsi energi penduduk perdesaan sebesar 2.119 kkal. Perbedaan tingkat konsumsi energi ini dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah komoditas makanan yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan yang lebih banyak. Selain itu, jenis komoditas makanan yang dikonsumsi penduduk perkotaan juga lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan.

Tabel 7. Konsumsi Energi Per Kapita Sehari Menurut Wilayah di DIY, 2012-2019 (%)

Tahun	Energi (Kkal)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
2012	1.861	1.842	1.854
2013	2.000	1.992	1.998
2014	2.029	1.987	2.015
2015	1.939	1.940	1.940
2016	2.070	2.050	2.063
2017	2.259	2.243	2.254
2018	2.251	2.151	2.224
2019	2.231	2.119	2.201

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Sumber utama energi yang dikonsumsi oleh penduduk DIY sebagian besar berasal dari kelompok makanan jadi dan padi-padian. Pada kondisi Maret 2019, rata-rata konsumsi energi perkapita sehari dari kelompok makanan jadi mencapai 778 kkal dan memberi sumbangan sebesar 35,4%. Sementara, konsumsi energi dari komoditas padi-padian mencapai 646 kkal dan memberi andil sebesar 29,4% terhadap total konsumsi energi. Sumber energi dari kelompok makanan jadi cenderung meningkat, sementara kelompok padi-padian cenderung menurun. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pola konsumsi penduduk akibat meningkatnya tingkat pendapatan maupun perubahan gaya hidup pada kelas menengah ke atas. Fenomena ini cukup selaras dengan perkembangan

aktivitas kuliner dan restoran yang terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Jenis komoditas padi-padian yang paling besar sumbangannya adalah beras. Sumber energi terbesar berikutnya berasal dari kelompok kelompok minyak dan kelapa dengan andil 11,1% serta bahan minuman dengan andil 5,7%. Kelompok komoditas yang lainnya memberi andil konsumsi energi dengan besaran yang bervariasi kurang dari 4%.

Beberapa kelompok makanan mengalami kenaikan konsumsi energi diantaranya adalah daging dan bumbu-bumbuan.

Tabel 8. Konsumsi Energi Perkapita Sehari (kcal) menurut Kelompok di DIY, 2017-2019

Kelompok Makanan	2017		2018		2019	
	Kkal	%	Kkal	%	Kkal	%
Padi-padian	724	32,1	674	30,3	646	29,4
Umbi-umbian	42	1,9	27	1,2	25	1,1
Ikan	25	1,1	25	1,1	25	1,1
Daging	76	3,4	63	2,9	64	2,9
Telur dan Susu	71	3,2	80	3,6	75	3,4
Sayur-sayuran	39	1,7	40	1,8	40	1,8
Kacang-kacangan	72	3,2	70	3,1	64	2,9
Buah-buahan	63	2,8	65	2,9	53	2,4
Minyak&kelapa	229	10,2	236	10,6	243	11,1
Bahan minuman	119	5,3	123	5,5	126	5,7
Bumbu-bumbuan	9	0,4	8	0,4	9	0,4
Lainnya	61	2,7	55	2,5	53	2,4
Makanan Jadi	723	32,1	756	34	778	35,4
Jumlah	2.254	100	2.224	100	2.200	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Walaupun tingkat konsumsi energi di DIY sudah melebihi yang dianjurkan, namun jika dilihat dari keberagaman jenis/golongan pangan yang dikonsumsi masyarakat masih perlu ditingkatkan khususnya konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang- kacangan. Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung karena umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glikemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan.

Protein adalah salah satu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah makro atau banyak. Menurut PGS, konsumsi protein adalah 2-4 porsi setiap hari dan bisa didapatkan dari protein hewani dan nabati. Akan tetapi, kualitas protein lebih tinggi pada protein hewani karena kandungan asam amino yang lebih lengkap (Hardinsyah, 2018).

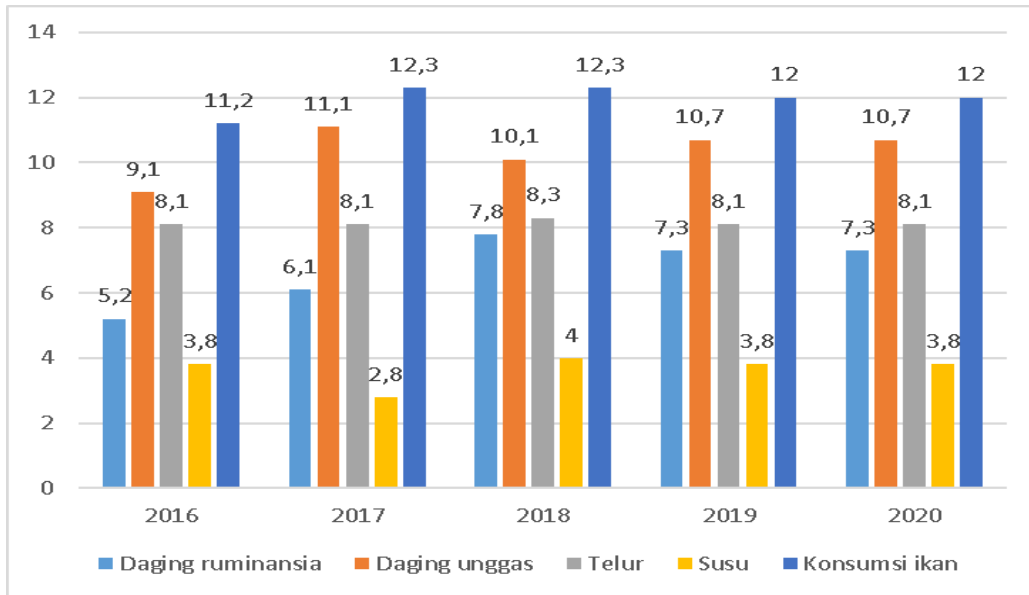
Konsumsi protein penduduk DIY selama periode 2012-2019 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara berfluktuasi. Konsumsi protein perkapita penduduk DIY sejak tahun 2013 sudah melebihi standar minimum yang ditentukan oleh Permenkes RI yakni 57 gram sehari. Bahkan, pada tahun 2019 konsumsi protein perkapita sudah berada di atas level 70 gram sehari. Berdasarkan wilayah, konsumsi protein perkapita penduduk perkotaan selama tujuh tahun terakhir tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hal ini terjadi karena konsumsi kelompok makanan yang menjadi sumber protein penduduk perkotaan sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan. Konsumsi protein perkapita sehari penduduk perkotaan pada tahun 2019 mencapai 73,26 gram sehari.

Tabel 9. Konsumsi Protein Per Kapita Sehari Menurut Wilayah di DIY, 2012-2019 (%)

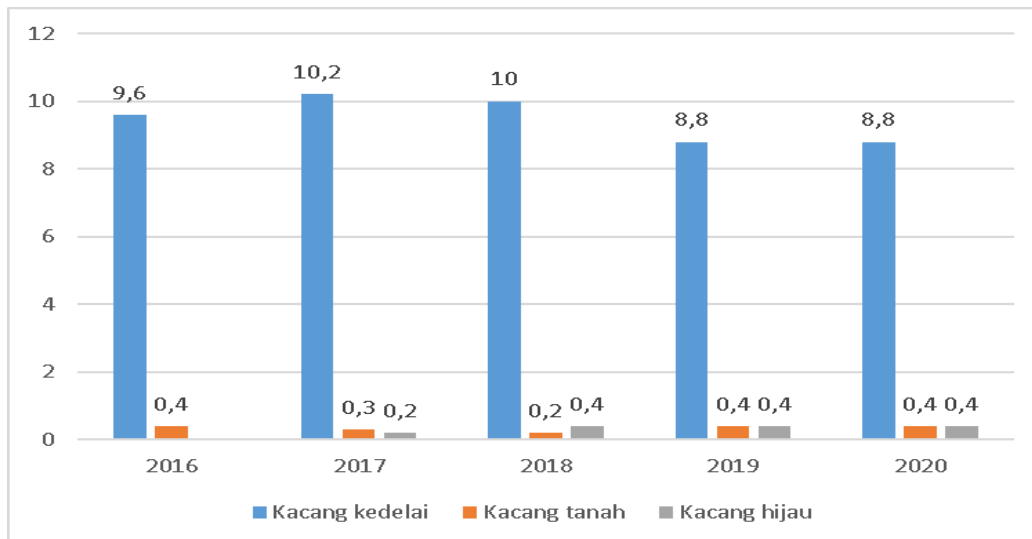
Tahun	Protein (Gram)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
2012	56,71	50,70	54,69
2013	64,66	55,83	61,67
2014	65,56	54,95	61,94
2015	60,08	52,33	57,48
2016	64,54	55,68	67,71
2017	72,76	62,73	69,78
2018	73,20	62,02	70,18
2019	73,26	62,81	70,43

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel di atas memberi gambaran bahwa konsumsi protein di perkotaan sudah melebihi angka kecukupan minimum yang ditentukan yakni 57 gram sehari sejak tahun 2013. Sementara, konsumsi protein perkapita sehari penduduk perdesaan sudah melebihi angka kecukupan minimum protein yang ditentukan sejak tahun 2017. Sumber utama protein yang dikonsumsi penduduk DIY berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi serta kelompok padi-padian. Rata-rata konsumsi protein perkapita kelompok makanan dan minuman jadi pada tahun 2019 sebesar 30,85 gram sehari dan memberi andil sebesar 43,8% terhadap total konsumsi protein. Konsumsi protein dari sumber makanan jadi memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata konsumsi protein perkapita dari kelompok padi-padian tercatat sebesar 15,23 gram atau memberi andil 21,6% terhadap total konsumsi protein. Selanjutnya selain kelompok pangan sumber karbohidrat, BPS DIY (2019) melaporkan berturut-turut konsumsi kelompok pangan hewani (309 KKal/Kap/Hari), minyak dan lemak (219 KKal/Kap/Hari), buah/biji berminyak (29 KKal/Kap/Hari), kacang-kacangan (66 KKal/Kap/Hari), gula (112 KKal/Kap/Hari), sayur dan buah (140 KKal/Kap/Hari) dan kelompok pangan lain-lain (50 KKal/Kap/Hari). Nilai konsumsi kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan berturut-turut digambarkan dalam Gambar 11 dan Gambar 12.

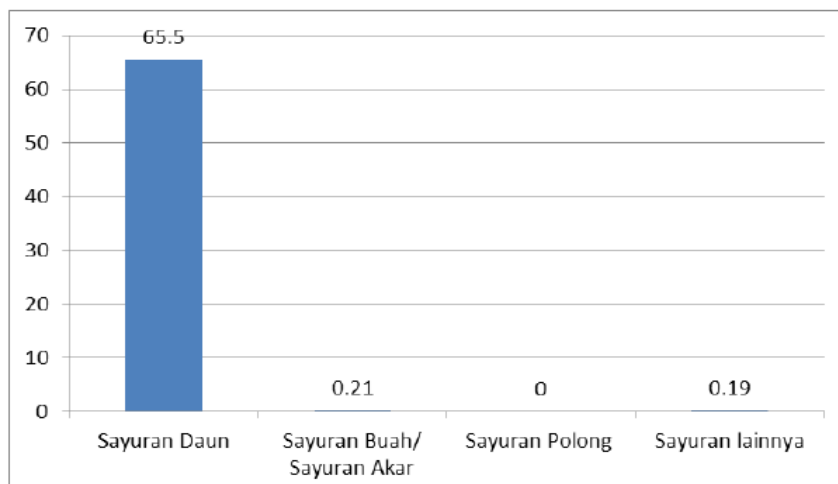


Gambar 11. Konsumsi pangan hewani di DIY (kg/kap/tahun)
(Sumber: DPKP DIY, 2021)



Gambar 12. Konsumsi pangan kacang-kacangan di DIY (kg/kap/tahun)
(Sumber: DPKP DIY, 2021)

Rerata tertinggi penduduk DIY mengonsumsi sayuran dan olahan dengan jenis sayuran daun sebesar 65,5 gram per hari. Persentase penduduk yang mengonsumsi bahan makanan kelompok sayuran dan olahan berupa sayuran daun sebesar 85%.



Gambar 13. Rerata Kelompok Sayuran dan Olahan per orang per hari (gram) Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014
(Sumber: Survei Diet Total, 2014)

Dapat dilihat pada Tabel bahwa konsumsi sayuran tertinggi pada kelompok usia 19-55 Tahun, dengan rerata konsumsi total untuk sayuran sebesar 74,2 gram. Kelompok usia yang reratanya paling rendah dalam mengonsumsi sayuran adalah kelompok usia di bawah 1 tahun, dengan konsumsi sebesar 25 gram per hari (Sugianto et al., 2014).

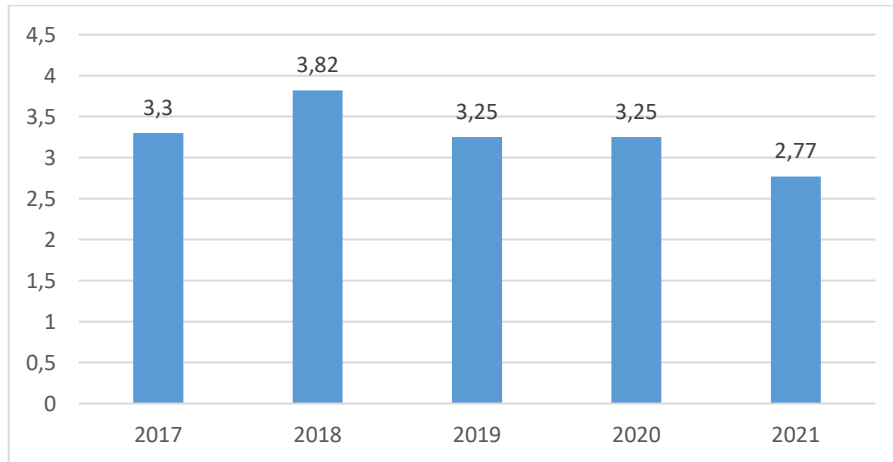
Tabel 10. Rerata Konsumsi Kelompok Sayuran dan Olahan per orang per hari (gram) Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Kelompok Umur	Jenis Sayuran dan olahan (g)										
	Sayuran Daun		Sayuran Buah/ Sayuran Akar		Sayuran Polong		Sayuran lainnya		Total		
	Rerata	SD	Rerata	SD	Rerata	SD	Rerata	SD	Rerata	SD	
0 – 59 bln	25,0	29,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	29,4
5 – 12 thn	44,9	58,2	0,30	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	58,1
13 – 18 thn	52,0	49,3	0,58	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	49,9
19 – 55 thn	73,6	67,7	0,24	2,47	0,00	0,18	0,36	3,74		74,2	69,6
> 55 thn	69,7	63,6	0,02	0,23	0,00	0,00	0,01	0,22		69,7	63,6
Semua umur	65,5	64,2	0,21	2,42	0,00	0,13	0,19	2,70		65,9	65,3

(Sumber: Survei Diet Total, 2014)

Menurut pedoman gizi seimbang, konsumsi sayur yang dianjurkan dalam satu hari adalah 3-4 porsi. Seperti contoh konsumsi bayam satu porsi adalah 100 gram. Jika dianalogikan atau dicontohkan bahwa konsumsi sayuran daun salah satunya adalah bayam, maka rerata konsumsi tertingginya pada kelompok usia 19-55 Tahun adalah sebesar 73,6 gram. Jumlah tersebut hanya memenuhi 21% dari anjuran 3-4 porsi. Padahal konsumsi sayur dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi optimal.

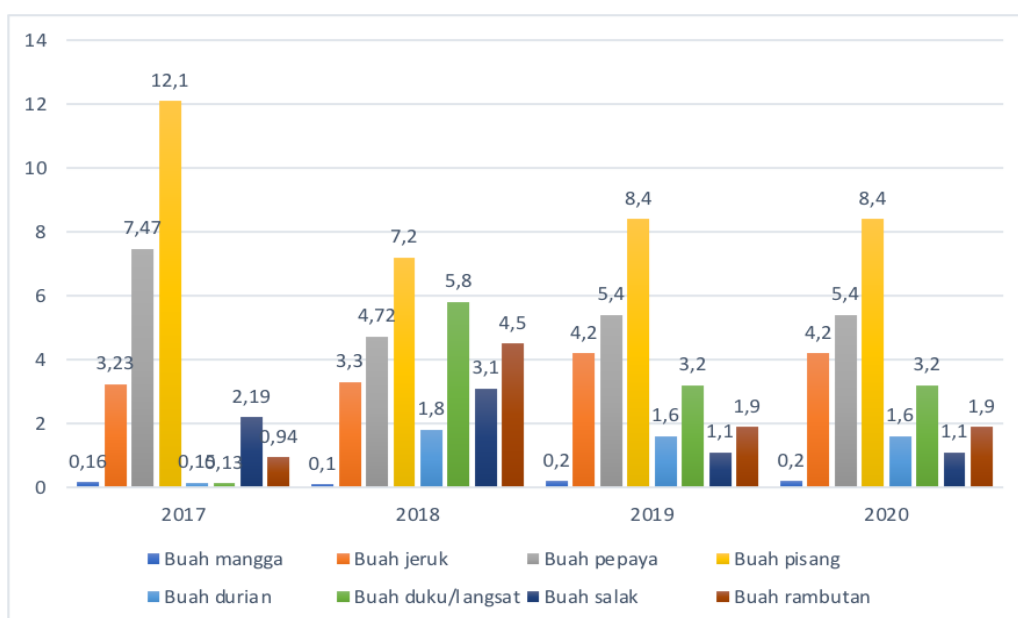
Rata-rata konsumsi buah pada Tahun 2020 sebesar 3,25 kg/kapita/tahun, maka rata-rata konsumsi hariannya adalah 8,87 gram. Padahal menurut Pedoman Gizi Seimbang, konsumsi harian untuk buah adalah 2-3 porsi. Sebagai contoh konsumsi pisang yang dianjurkan adalah 80-120 gram (Kementerian Kesehatan RI, 2014).



Gambar 14. Rata-rata konsumsi buah di DIY per kg per kapita per tahun dari Tahun 2017-2021 (Sumber: DPKP DIY, 2021)

Beragam buah lokal dapat tumbuh subur di DIY seperti pisang dan pepaya. Yogyakarta juga dikenal sebagai salah satu kota penghasil buah salak yang berada di kawasan Kecamatan Turi, Cangkringan, dan Pakem di Kabupaten Sleman. Jenis buah-buahan yang banyak dikonsumsi masyarakat DIY antara lain pisang, pepaya, dan jeruk. Pisang merupakan buah dengan konsumsi tertinggi di DIY. Konsumsi pisang pada Tahun 2020 adalah 8,4 kg/kapita/tahun, maka rata-rata konsumsi hariannya adalah 22,95 gram. Konsumsi satu porsi yang dianjurkan untuk pisang adalah 40 gram, maka rata-rata konsumsinya hanya memenuhi kurang dari 1 porsi.

Selain itu, buah-buahan yang dikonsumsi adalah dukuh/langsat, salak, rambutan, manga, dan durian dalam jumlah fluktuatif. Berbagai macam buah-buahan tersebut menunjukkan konsumsi yang beragam dari masyarakat DIY. Dilihat dari Gambar 15, maka terlihat bahwa kualitas konsumsi buah sudah cukup baik, namun secara kuantitas masih harus diupayakan untuk secara minimal memenuhi anjuran dari Kementerian Kesehatan RI.



Gambar 15. Konsumsi buah di DIY (kg/kap/tahun) (Sumber: DPKP DIY, 2020)

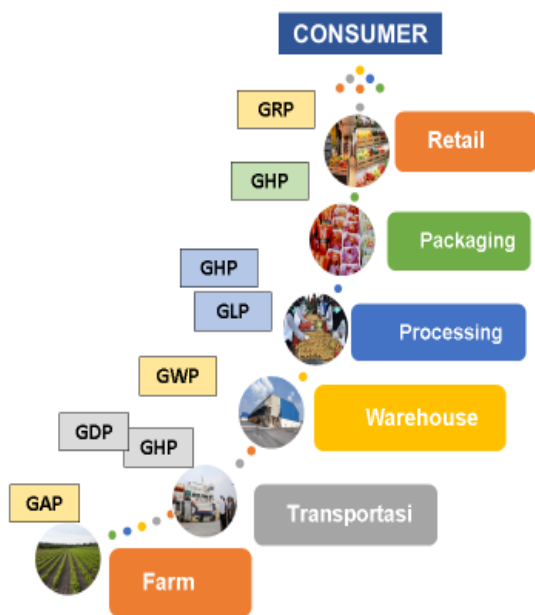
Makanan tradisional adalah produk makanan dari suatu daerah yang dibuat secara tradisional, dalam arti proses pembuatannya dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana. Pada umumnya, makanan tradisional menggunakan bahan-bahan lokal dengan biaya yang relatif kecil dan merupakan resep turun-temurun. Bahan-bahan lokal berarti mudah didapatkan di daerah setempat dan menjadi ciri khas suatu daerah. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang masih sangat kental dengan budaya daerah, begitu pula dengan makanan tradisionalnya. Bahkan, sector kuliner Yogyakarta menjadi daya tarik bagi banyak orang dari pelosok wilayah, baik dalam maupun luar negeri (Arsanti, dkk., 2016). Dari penjelasan ini, terlihat bahwa makanan tradisional berbasis pangan lokal mempunyai banyak potensi manfaat.

Makanan tradisional berbasis pangan lokal Khas Yogyakarta juga mempunyai potensi sebagai pangan yang memenuhi syarat gizi. Berdasar kajian makanan bergizi adalah makanan yang kaya akan protein (tinggi protein), dan atau memenuhi kebutuhan karbohidrat (tinggi karbohidrat), dan atau rendah lemak karena dapat memicu penyakit. Beberapa makanan yang menjadi potensi tinggi protein antara lain Ampyang, Peyek Mbok Tumpuk, Bakpia, Tempe dan Tahu Bacem Kaliurang, Mento, Sagon, Nasi Gudeg, Nasi Merah Lengkap Wonosari, Mi Jawa, Lotek, Soto Kadipiro, Sate Jamur, Ayam Goreng, Gurami, Belut Goreng, Sate Karang, Sate Klathak, Sambel Goreng, dan Brongkos. Dari makanan-makanan tersebut, konsumsinya harus hati-hati karena mempunyai kandungan lemak yang setara bahkan lebih tinggi dari proteinnya, yakni Ampyang, Peyek, Tahu Bacem, Sagon, Nasi Gudeg, Mi Jawa, Lotek, Gudangan, Sate Jamur, Ayam Goreng, Belut Goreng, Sate Klathak, Sambel Goreng, dan Brongkos.

Data menarik ditunjukkan dari Bubur Garut dan Bubur Gempol yang mempunyai kandungan lemak dan energi yang rendah, sehingga jika mempunyai penyakit yang harus membatasi keduanya, makanan tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif. Nasi gudeg sangat dikenal DIY, jika melihat kandungan gizinya, maka konsumsinya harus berhati-hati karena satu piring dapat memenuhi hampir setengah kecukupan energi harian (40,28%) dengan kandungan lemak yang juga cukup tinggi. Walaupun lotek merupakan makanan sehat karena berisi sayuran, namun juga harus hati-hati karena kandungan lemaknya yang cukup tinggi (58.07%).

4. Keamanan pangan

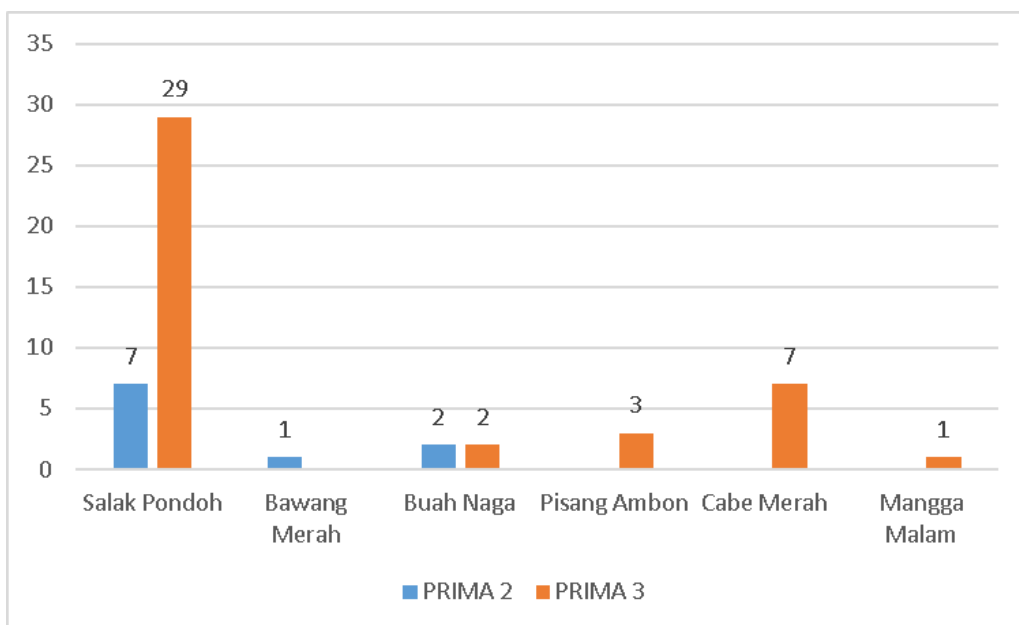
Keamanan pangan menjadi bagian penting dalam konteks ketahanan pangan. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia penjaminan keamanan dan kualitas pangan dimulai sejak proses produksi di hulu sampai dengan pangan diterima konsumen. Alur penjaminan keamanan pangan secara komprehensi disajikan pada Gambar 16.



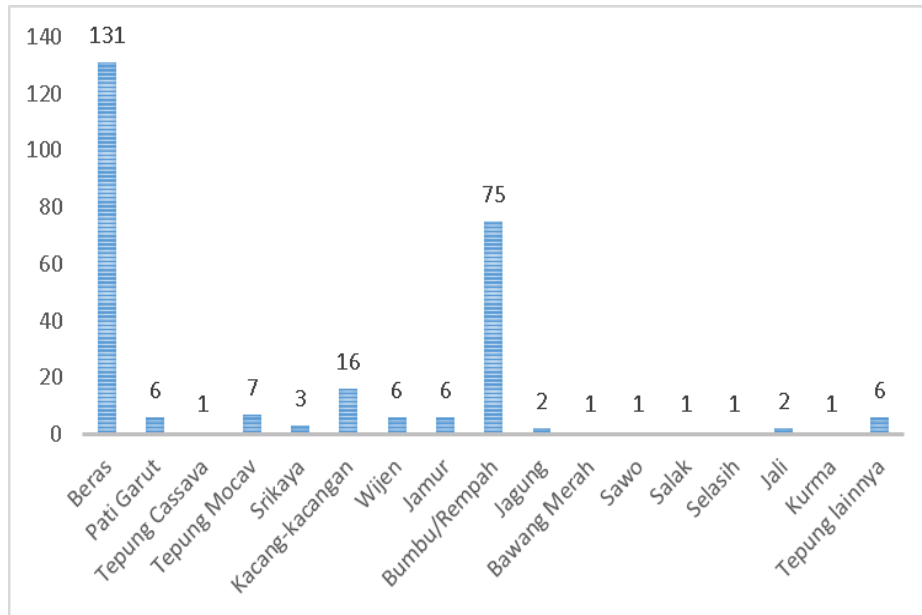
- **GAP (Good Agriculture Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran selama masa budidaya atau panen/menangkap ikan/seafood.
- **GHP (Good Handling Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penanganan, pengangkutan dan penyusunan selama proses perpindahan, baik dari dan kedalam kendaraan, dari dan kedalam gudang.
- **GDP (Good Distribution Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran dari ketidaksesuaian proses penyaluran produk menurut kategori produk pangan dan persyaratan produk termasuk saluran pemasaran (*distribution channel*) dan rantai dingin (*Cold Chain*).
- **GWP (Good Warehouse Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penyimpanan di dalam gudang, seperti batas jumlah tumpukan, penyimpanan yang bersamaan dengan bahan kimia dan bahan berbahaya, suhu ruangan, dan lain sebagainya.
- **GRP (Good Retail Practices):** yaitu prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam tata cara penyusunan dan penyajian produk di retail (toko). Prosedur ini adalah pengembangan dari prosedur GWP.
- **GLP (Good Laboratory Practices):** Prosedur untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam proses pemeriksaan produk di laboratorium.

Gambar 16. Alur penjaminan keamanan dan kualitas pada rantai suplai pangan

Penjaminan kewanaman pangan bagi masyarakat telah diupayakan Pemerintah Daerah DIY, salah satu bukti yang mengedepan adalah dengan dibentuknya OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah). OKKPD DIY merupakan lembaga non struktural yang berada di dalam instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, yang memiliki tugas menjamin keamanan pangan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah DIY. Data hingga kuartal pertama tahun 2021 menunjukkan bahwa telah dikeluarkan Sertifikat Prima 2 bagi 10 kelompok dan Sertifikat Prima 3 bagi 48 kelompok (Gambar 17). Sementara di DIY juga telah dijumpai 245 unit terregistrasi PD (Gambar 18) serta 4 unit ter-registrasi RH, yakni: Rumah Kemas Asosiasi Prima Sembada; Paguyuban Petani salak "Mitra Turindo", TOM (tani Organik Merapi) dan Buah Angkasa.



Gambar 17. Kinerja output sertifikasi Prima 2 dan Prima 3 OKKPD DIY 2007 s/d 2021
Sumber DPKP DIY (2021)



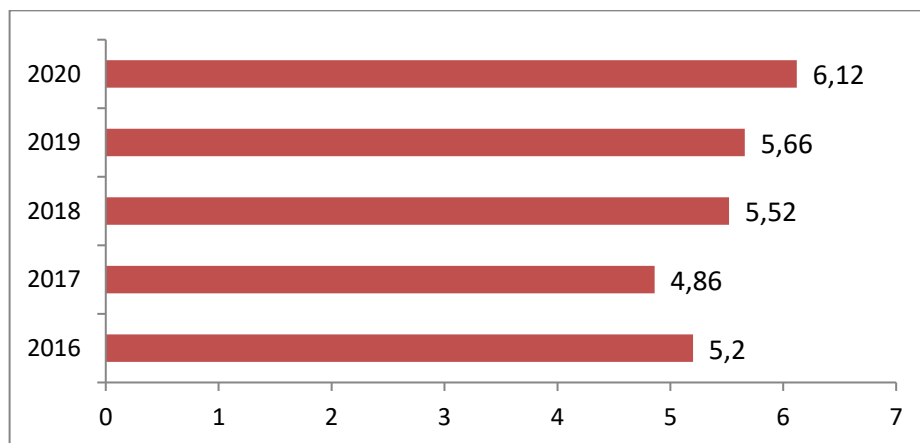
Gambar 18. Kinerja output Registrasi PD OKKPD DIY 2007 s/d 2021
Sumber DPKP DIY (2021)

A.2. Situasi Gizi dan Kesehatan Masyarakat

1. Situasi Gizi

(1) Berat badan lahir rendah (BBLR)

BBLR adalah berat badan bayi saat lahir kurang dari 2.500 gram. Bayi dikatakan tidak BBLR jika berat saat lahir \geq 2.500 gram. BBLR berkaitan dengan kesehatan ibu saat hamil, bahkan jauh sebelum hamil atau masa remaja (Loius et al, 2016). Prevalensi BBLR di DIY sedikit mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, secara detail pada Gambar 20. Sedangkan secara rinci tiap kabupaten pada Tabel 11.



Gambar 20. Prevalensi BBLR di DIY 2016-2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

Tabel 11. Prevalensi BBLR di Kabupaten dan Kota di DIY pada tahun 2016-2020

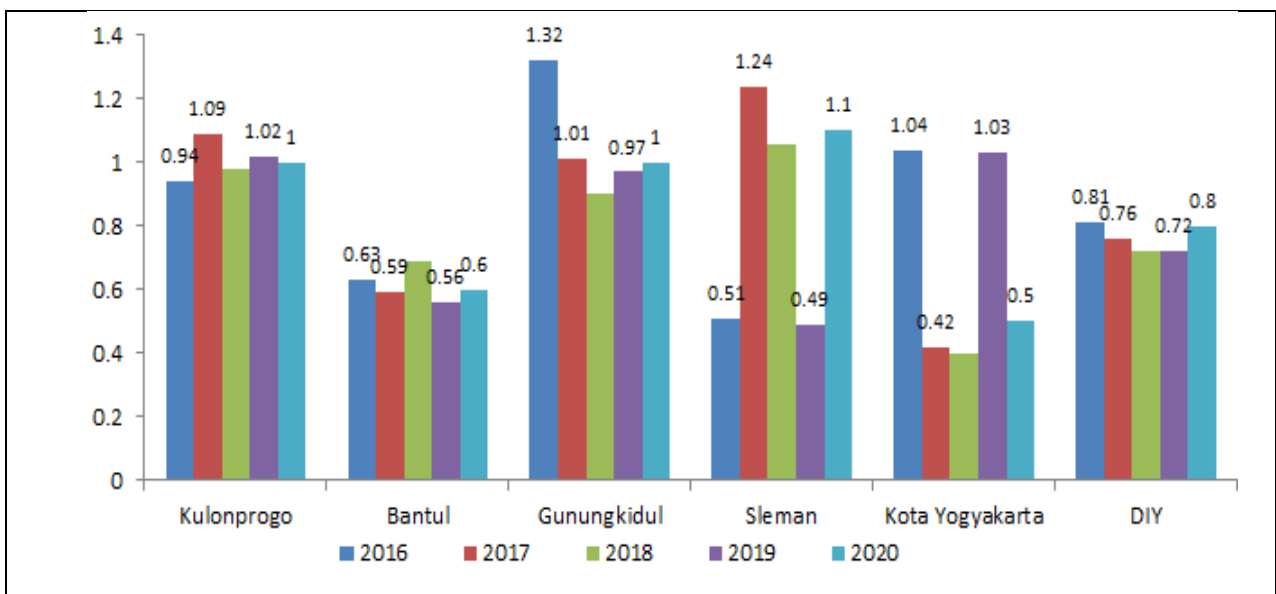
No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kulon Progo	7,47	6,69	7,09	7,48	6,64
2	Bantul	3,66	3,79	3,80	4,90	5,60
3	Gunung Kidul	6,68	5,67	7,15	6,16	7,05
4	Sleman	4,84	4,65	5,37	5,34	5,70
5	Yogyakarta	5,47	5,26	6,64	6,08	6,93

DIY	5,20	4,86	5,52	5,66	6,12
-----	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

(2) Bawah Garis Merah

Bawah garis merah merupakan gambaran hasil pemantauan Berat Badan menurut Umur pada KMS berada di kurva pertumbuhan bawah garis merah. Balita 2T adalah balita yang hasil pemantauan Berat Badan menurut umur selama dua (2) bulan berturut-turut tidak naik berat badannya. Pada anak BGM, setelah dirujuk dan dikonfirmasi, tidak perlu dirujuk kembali jika garis pertumbuhannya mengikuti garis pertumbuhan di atasnya (N). Namun jika berat badan tidak mengalami kenaikan (T) maka harus dirujuk (Kemenkes RI, 2020). BGM merupakan peringatan bagi penanganan dan tindak lanjut segera agar balita tidak jatuh pada derajat malnutrisi yang lebih parah. Pada tahun 2020, prevalensi balita BGM di DIY adalah 0,8%, dengan rentang 0,5% (Kab Sleman) hingga Kab Gunung Kidul (1,1%). Secara detail digambarkan pada Gambar 21.



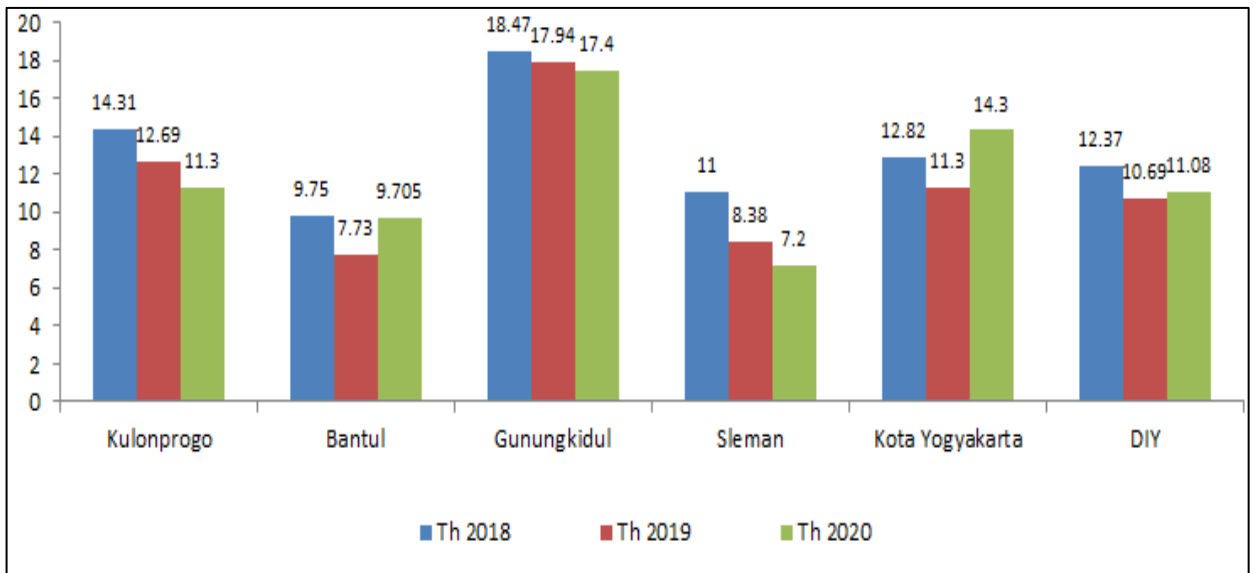
Gambar 21. Prevalensi BGM di DIY tahun 2016-2020

Sumber : Dinkes DIY, 2021

(3) Stunting

Stunted adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak yang ditandai dengan tinggi badan kurang dari standar (< -2 Z-Score WHO 2005). *Stunted* menjadi isu kesehatan masyarakat karena berdampak pada semua siklus kehidupan, sejak lahir hingga dewasa atau lansia (Dewey et al, 2011). Pada umumnya *stunted* disertai dengan keterlambatan perkembangan pada setiap tahapan usia. Sehingga pada balita yang mempunyai riwayat malnutrisi kronis sejak kandungan yang ditandai dengan BBLR, lahir pendek, dan tetap tumbuh pendek pada usia kanak-kanak memerlukan stimulasi perkembangan yang lebih intensif (Walker, 2007). Menurut Riskesdas 2018, prevalensi stunting di DIY paling rendah setelah DKI (21,4%). Dan menurut data Dinkes DIY, 2021 prevalensi balita *stunted* terus

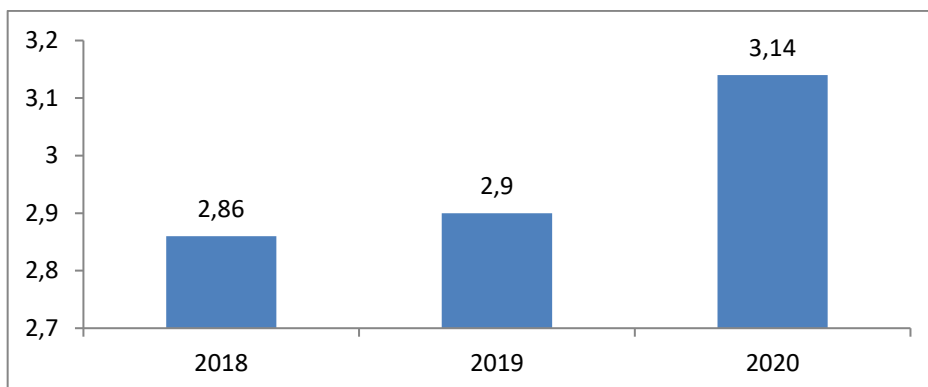
menerus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, secara detail pada Gambar 22.



Gambar 22. Prevalensi balita stunted di DIY tahun 2018-2020
Sumber: Dinkes DIY, 2021

(4) Balita Gizi Lebih

Selain kurang gizi dalam bentuk wasting maupun stunted, gizi lebih merupakan ancaman permasalahan gizi yang harus mendapat perhatian. Menurut Riskesdas 2018, terdapat kecenderungan kenaikan prevalensi gizi lebih pada setiap kelompok umur termasuk balita. Pada beberapa penelitian dinyatakan bahwa anak-anak yang stunting menderita gizi lebih (Pettifor, 2006). Dalam analisis Siswati (2018) juga dinyatakan bahwa menurut Riskesdas 2007, 2010 dan 2013 terdapat kecenderungan keseimbangan energi positif pada anak-anak stunting, sehingga hal ini potensi berkembang menjadi obesitas, gangguan intoleransi glukosa dan bentuk penyakit tidak menular lainnya di kemudian hari (Weiss et al., 2004). Secara detail prevalensi gizi lebih balita di DIY pada tahun 2018-2020 seperti pada Gambar 23.



Gambar 23. Prevalensi balita gizi lebih di DIY tahun 2018-2020
Sumber: Dinkes DIY, 2021

2. Kesehatan Masyarakat

a) Determinan masalah kesehatan masyarakat

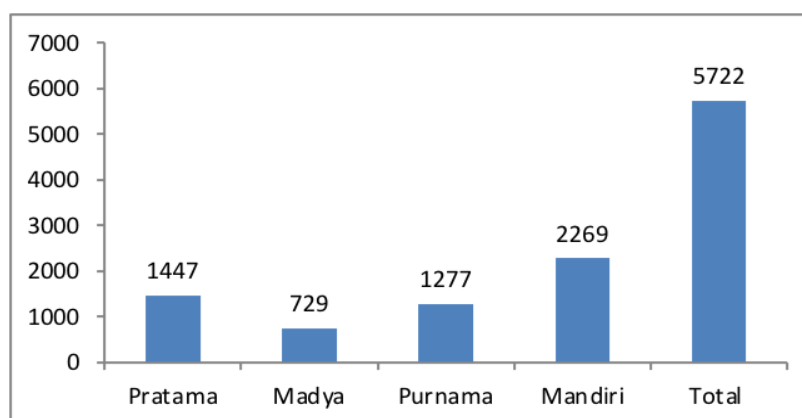
Secara umum kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kemiskinan, pendidikan, ketersediaan pangan, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan faktor langsung seperti konsumsi dan infeksi. Secara detail digambarkan pada Gambar 22.



Gambar 24. Kerangka penyebab masalah gizi/kesehatan

b) Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

UKBM adalah wahana peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, seperti Posyandu, Posbindu, Posyandu prakonsepsi, PKK, dan lain-lain. Di DIY terdapat 5.722 Posyandu Pratama hingga Mandiri (Gambar 25).



Gambar 25. Jenjang Posyandu tahun 2020

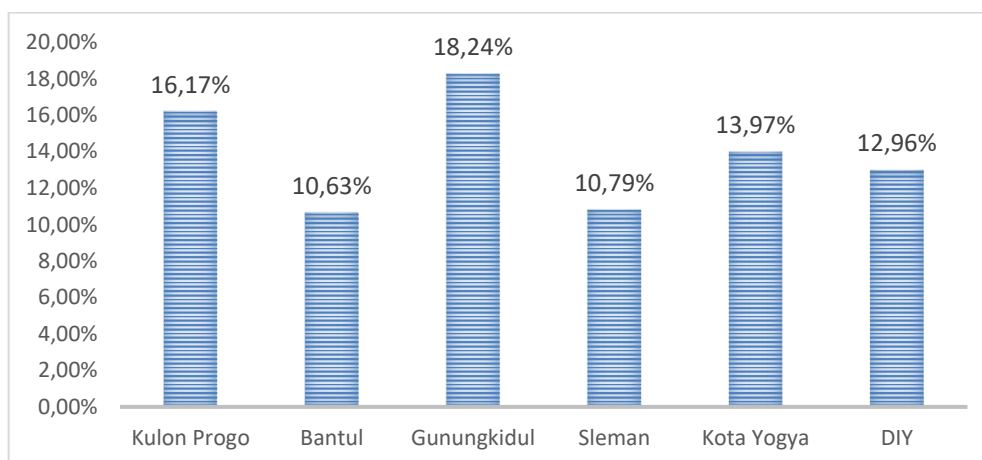
Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

c) Kesehatan Ibu hamil

(1) Ibu Hamil Mengalami Kurang Energi Kronis (KEK)

Kesehatan ibu merupakan faktor penting terhadap outcome kehamilan. Pada tahun 2019 dan 2020 anemi ibu hamil sebesar 15,69% dan 15,84%. Selain itu, prevalensi ibu hamil yang menderita KEK di DIY tiga tahun berturut-turut

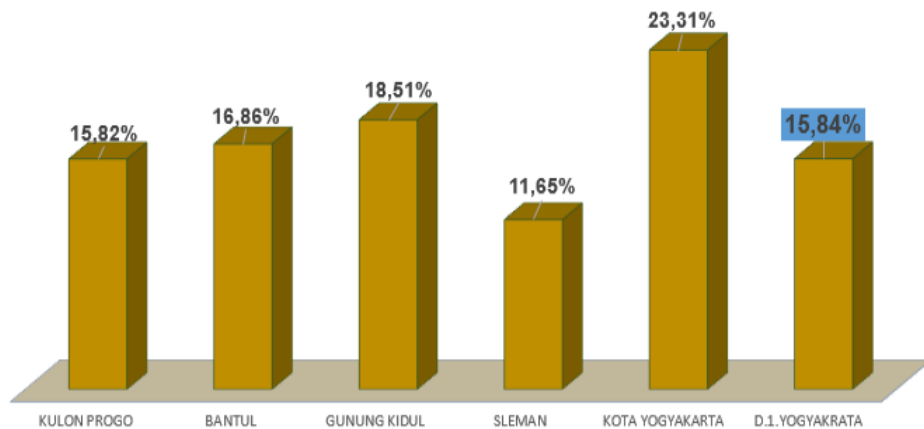
mengalami kenaikan. Prevalensi ibu hamil KEK pada tahun 2018 sebesar 11,76%, sedangkan untuk tahun 2019 naik menjadi 12,68%, dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 12,96%. Kabupaten yang masih menunjukkan angka yang tinggi diatas rata rata DIY, yaitu Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Permasalahan Bumil KEK merupakan permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih baik, mengingat status kesehatan ibu hamil sangat menentukan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.



Gambar 26. Ibu Hamil Mengalami KEK Kabupaten/Kota DIY tahun 2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

(2) Prevalensi Anemi

Anemi adalah gangguan darah atau kelainan hematologi yang ditandai dengan jumlah sel darah merah di bawah normal. Menurut WHO, ibu hamil mempunyai risiko anemia. Hal ini berkaitan dengan outcome kehamilan yang buruk seperti BBLR, bayi yang dilahirkan anemi, kelahiran prematur, dan kematian ibu. Prevalensi anemi ibu hamil di DIY pada tahun 2015 sebesar 14,85% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,09% dan kembali turun menjadi 14,32 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan 15,21, tahun 2019 naik menjadi 15,69 dan tahun 2020 naik menjadi 15,84. Klasifikasi Anemi berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan bahwa prevalensi Anemi paling sedikit adalah Kabupaten Sleman 11,65% dan paling tinggi Kota Yogyakarta (23,31%). Prevalensi anemia ini sedikit meningkat dari tahun 2019, yakni 12,68% (Dinkes DIY, 2020). Secara detail pada Gambar 27. Upaya menurunkan prevalensi anemia ibu hamil harus lebih dilakukan secara optimal mengingat target penurunan jumlah kematian ibu menjadi prioritas permasalahan kesehatan di DIY.

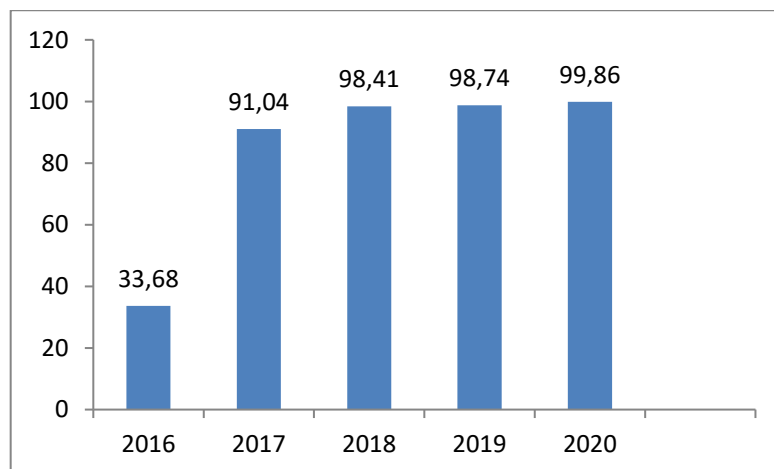


Gambar 27. Prevalensi Anemi Ibu Hamil di DIY tahun 2020
 Sumber : Dinkes DIY, 2021

(3) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1. Ibu Hamil KEK Mendapat PMT

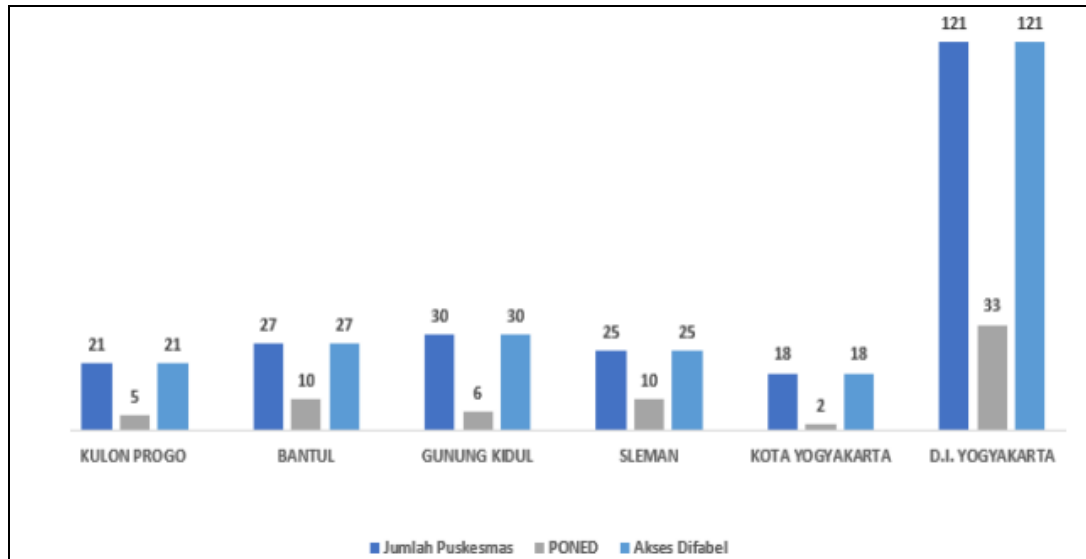
Pemerintah melalui kementerian kesehatan telah melakukan upaya untuk penanggulangan KEK pada ibu hamil melalui pemberian PMT. Hampir 100% ibu hamil KEK di DIY mendapatkan PMT . Secara detail pada Gambar 28.



Gambar 28. Ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT di DIY
 Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

2. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil. pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergeni Dasar (PONED) dan difabel.

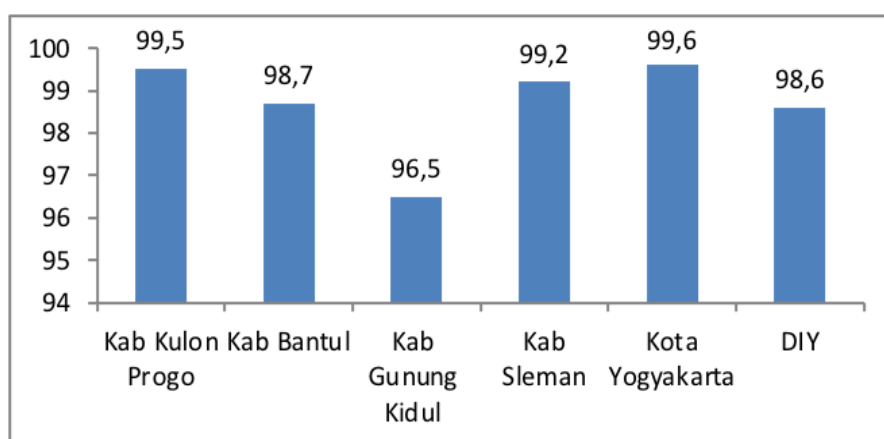
Semua Puskesmas (100%) di DIY sejak tahun 2016 mengadakan program kelas ibu hamil. Selain itu, semua Puskesmas di DIY (121 puskesmas) memberikan layanan/dapat diakses oleh kaum difabel. Sementara 33 Puskesmas melaksanakan layanan PONED (Gambar 29). Layanan PONED merupakan layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas rawat inap terkait kasus emergensi obstetri dan neonatus tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.



Gambar 29. Puskesmas yang melaksanakan layanan PONEC dan difabel di DIY, 2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

3. Ibu nifas yang mendapat vitamin A

Ibu nifas yang mendapatkan vitamin A di DIY pada tahun 2020 sebesar 98,6% dengan rentang 96,5% (Kab Gunung Kidul) hingga 99,6% (Kota Yogyakarta). Vitamin A pada ibu nifas sangat bermanfaat untuk mencegah infeksi pada bayi dan ibu pada masa post-partum, meningkatkan daya tahan tubuh, menyediakan supply vitamin A bagi bayi melalui ASI, mensupport kerja hormon utamanya growth hormone yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak yang optimal (Ahmat et al, 2015). Cakupan pemberian vitamin A pada ibu hamil di DIY tahun 2020. Secara detail pada Gambar 30.



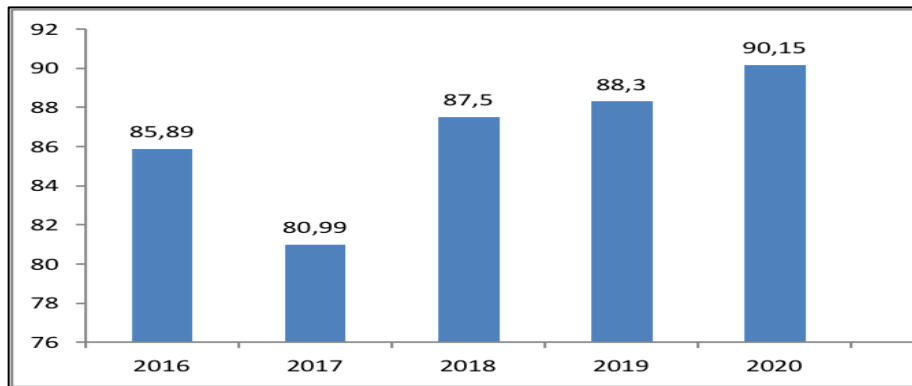
Gambar 30. Ibu nifas yang mendapat vitamin A di DIY
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

d) Kesehatan bayi dan balita

(1) Jumlah bayi dapat Inisiasi Menyusi Dini (IMD)

IMD merupakan proses aktif dari bayi merangkak di atas perut ibunya untuk menyusui segera setelah dilahirkan. IMD sangat membantu keberhasilan dan kelangsungan pemberian ASI eksklusif hingga pemberian ASI hingga balita berumur 2 tahun. Pengenalan dini menyusui akan membantu dalam membangun

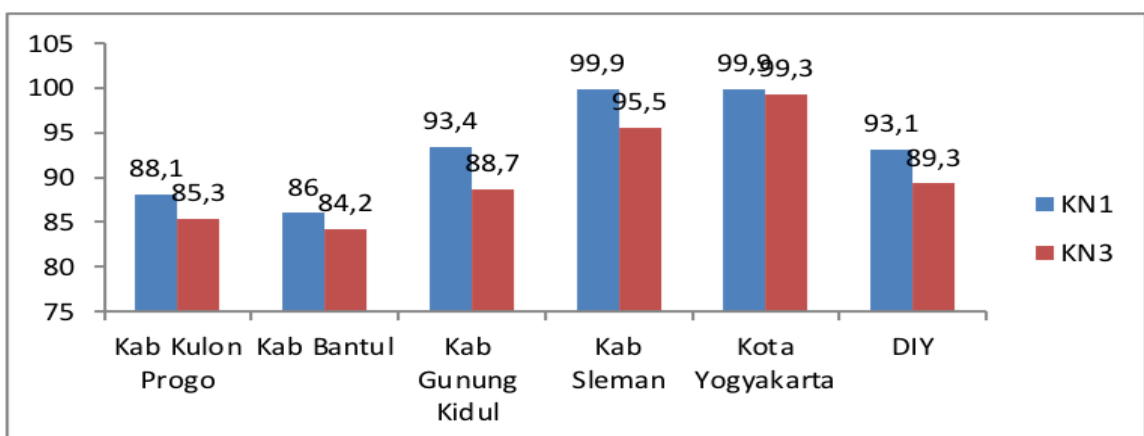
usus bayi yang steril secara alami untuk berkoloni dengan mikroorganisme yang aman dan juga organisme ibu, daripada berkoloni dengan organisme di kamar bayi rumah sakit dan pengasuh lainnya (Abie, 2019). Prevalensi IMD di DIY terus meningkat sejak tahun 2017 hingga 2020. Secara detail digambarkan dalam Gambar 31.



Gambar 31. Jumlah bayi yang mendapatkan IMD di DIY, 2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

(2) Cakupan kunjungan neonatal

Kunjungan neonatal (KN) adalah pelayanan sesuai standar yang diberikan tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatal. Menurut program kesehatan, pelayanan ini sedikitnya 3 (tiga) kali selama periode 0-28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah. Kunjungan Neonatal ke-1 (KN1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir; KN2 pada kurun waktu hari 3 hari-7 hari setelah lahir dan KN-3 hari 8 hari - 28 hari setelah lahir (Permenkes RI no 4 tahun 2019). Jumlah kunjungan neonatal di DIY pada tahun 2020 belum mencapai 100%. Secara detail digambarkan pada Gambar 32.

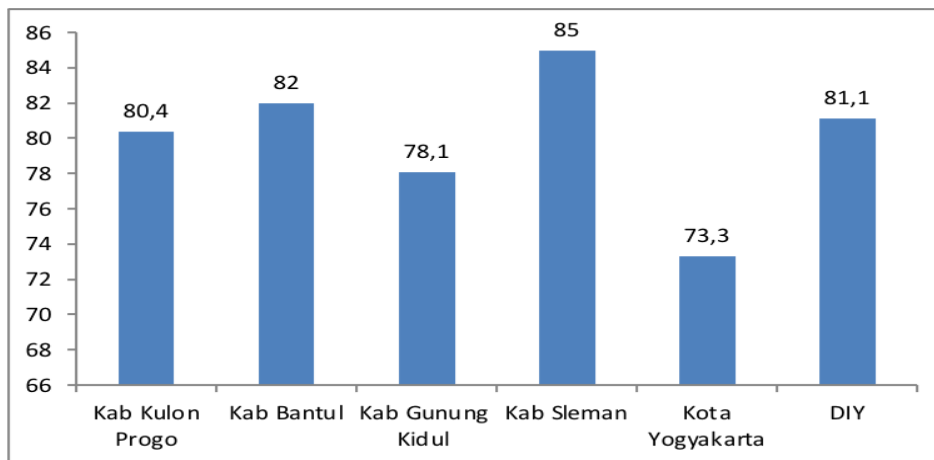


Gambar 32. Jumlah kunjungan neonatal di DIY, 2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

(3) Bayi < 6 bulan yang diberikan ASI eksklusif

Kesejahteraan dan kesehatan bayi dapat dilihat melalui indikator ASI eksklusif. Pemberian ASI merupakan landasan kelangsungan hidup anak, nutrisi dan

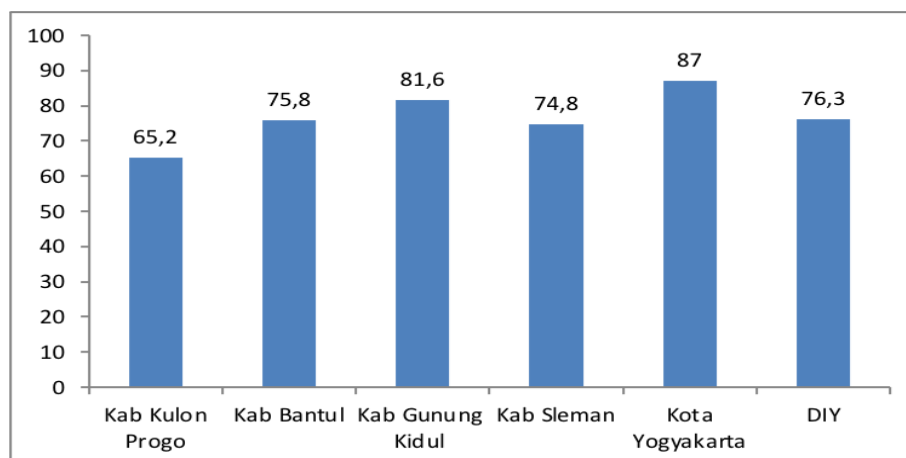
perkembangan serta kesehatan ibu. Kesehatan Dunia Organisasi (WHO) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, dan dilanjutkan dengan pemberian ASI dan makanan pendamping yang sesuai hingga 2 tahun atau lebih. Di DIY sebanyak 81,1% bayi <6 bulan mendapat ASI eksklusif. Secara detail pada Gambar 33.



Gambar 33. Jumlah bayi < 6 bulan yang diberi ASI eksklusif di DIY, 2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

(4) Cakupan pelayanan bayi

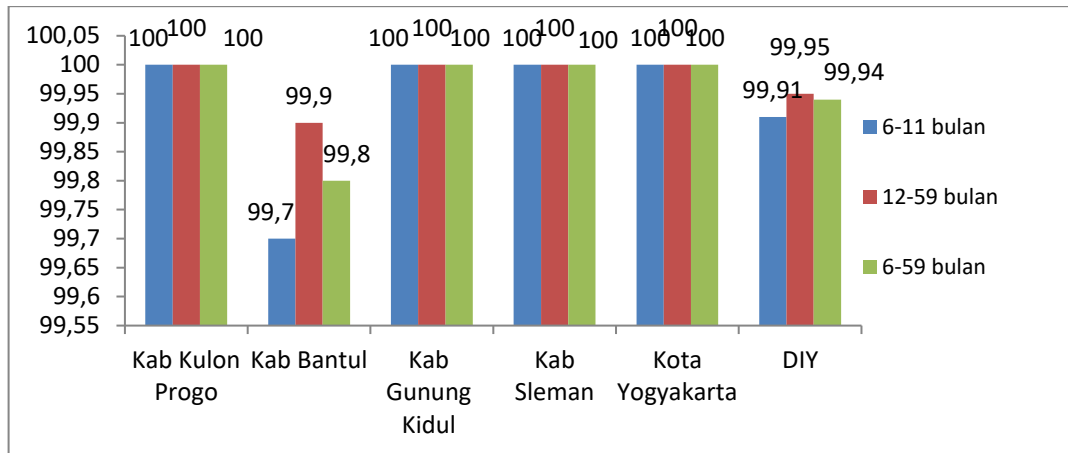
Cakupan pelayanan kesehatan bayi meliputi pemberian imunisasi dasar BCG, DPT HB1-3, Polio 1-4, Campak, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang SDIDTK bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi: konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit sesuai MTBS, pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan bayi di DIY pada tahun 2020 adalah 76,3%, secara detail pada Gambar 34.



Gambar 37. Jumlah cakupan pelayanan kesehatan bayi di DIY, 2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

(5) Cakupan pemberian vitamin A

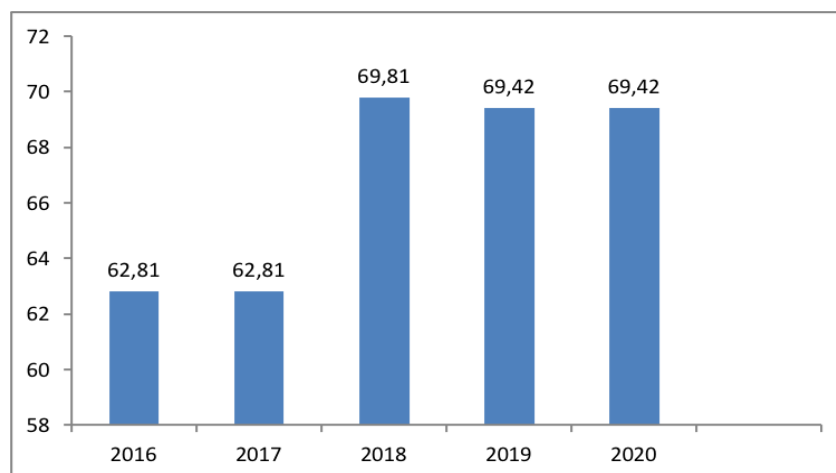
Suplementasi vitamin A dosis tinggi diberikan setahun 2 kali, yakni bulan Februari dan Agustus. Balita >6 bulan hingga 11 bulan diberi vitamin A 100.000 IU (warna biru) dan balita 12-60 bulan diberi vitamin A 200.000 IU (warna merah). Vitamin A diberikan untuk mencegah rabun senja, mencegah infeksi, meningkatkan nafsu makan balita, mengurangi risiko sakit dan kematian dini, serta mendukung pertumbuhan tinggi badan anak (Imdad, 2017). Cakupan vitamin A balita di DIY pada tahun 2020 hampir 100%. Secara detail pada Gambar 35.



Gambar 35. Cakupan pemberian vitamin A balita di DIY, 2020
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

e) Kesehatan remaja

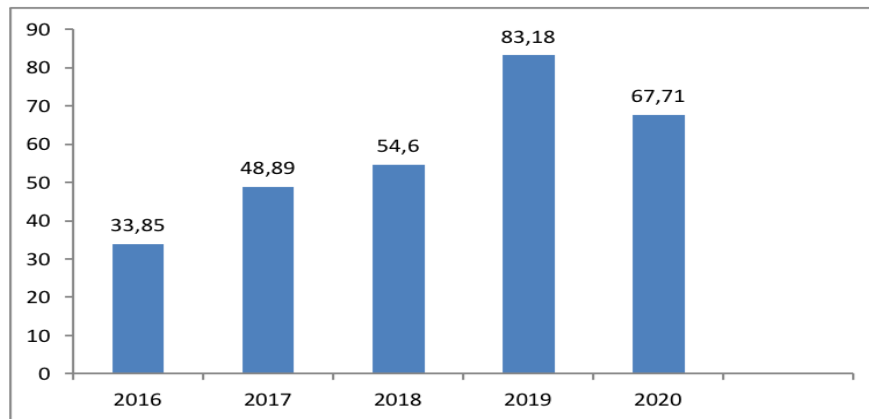
- (1) Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan remaja Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR adalah program pemerintah di Puskesmas untuk Memberikan edukasi serta informasi kepada remaja tentang kesehatan, pelayanan klinis medis, konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), dan Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Puskesmas di DIY yang melakukan pelayanan kesehatan remaja hampir 70%. Secara detail pada Gambar 36.



Gambar 36. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan remaja di DIY
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

- (2) Remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

Remaja putri adalah kelompok usia yang rentan menderita anemi. Masa remaja ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan kebutuhan zat besi meningkat selama masa ini. Remaja dengan pola makan yang buruk pada masa kanak-kanak awal dan/atau wanita yang mengalami menarche dini mungkin berisiko lebih besar untuk mengalami anemia karena penipisan yang cepat dari simpanan besi dalam tubuh mereka (Shaka et al, 2018). Trend cakupan suplementasi Fe pada remaja di DIY dari tahun 2016-2020 seperti pada Gambar 37.



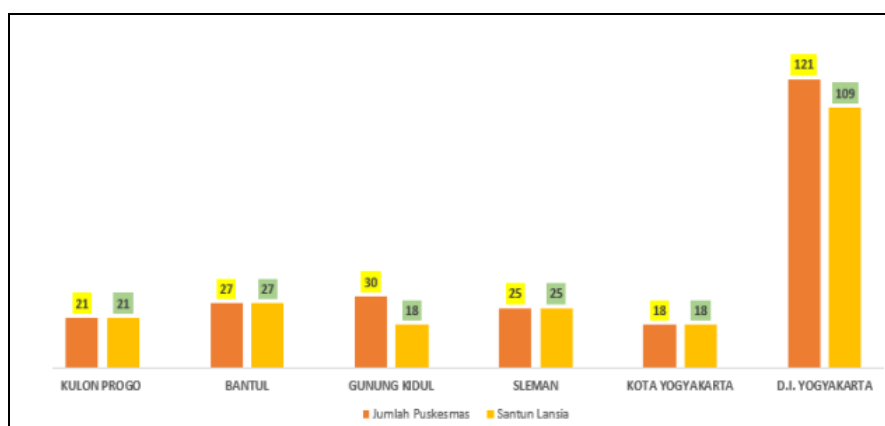
Gambar 37. Jumlah remaja putri yang mendapat TTD di DIY
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2021

f) Kesehatan usia produktif dan usia lanjut

(1) Pelayanan kesehatan usia produktif dan lansia

Berdasarkan laporan Dinkes DIY, sejak pencanangan Posbindu PTM hingga tahun 2019, telah terbentuk 1051 Posbindu (92% desa di DIY) (Dinkes DIY, 4 Januari 2021)

(2) Jumlah Puskesmas santun lansia di DIY

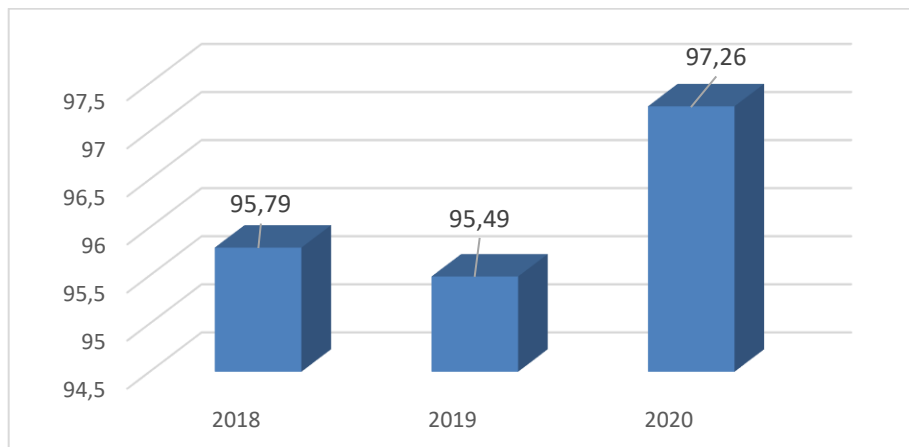


Gambar 38. Jumlah Puskesmas Santun lansia di DIY, 2020
Sumber : Dinkes DIY, 2021

g) Kesehatan lingkungan, pemukiman dan sanitasi

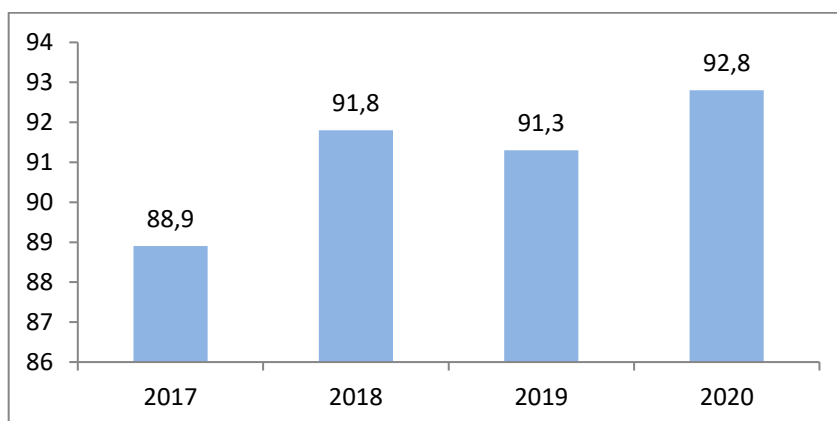
Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperbaiki kesehatan lingkungan merupakan metode yang mempunyai daya ungkit besar. Lingkungan merupakan faktor penting bagi kesehatan, karena derajat kesehatan merupakan

akibat dari bekerjanya faktor lingkungan dimana manusia lahir, hidup, tumbuh dan bekerja.



Gambar 39. Penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak di DIY
Sumber : DPUP dan ESDM DIY, 2021

Air merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi bagian penting dalam aspek kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa penyakit yang ditularkan melalui air yang tidak bersih, diantaranya diare yang menyebabkan morbiditas yang berulang hingga menyebabkan gizi kurang, gizi buruk dan stunting pada balita. Selain itu paparan bahan kimia dalam air minum dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis (misalnya, kanker dan penyakit kardiovaskular), hasil reproduksi yang merugikan dan efek pada kesehatan anak-anak (misalnya, perkembangan saraf), di antara efek kesehatan lainnya (Levallouis, 2019). Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada Gambar 43.

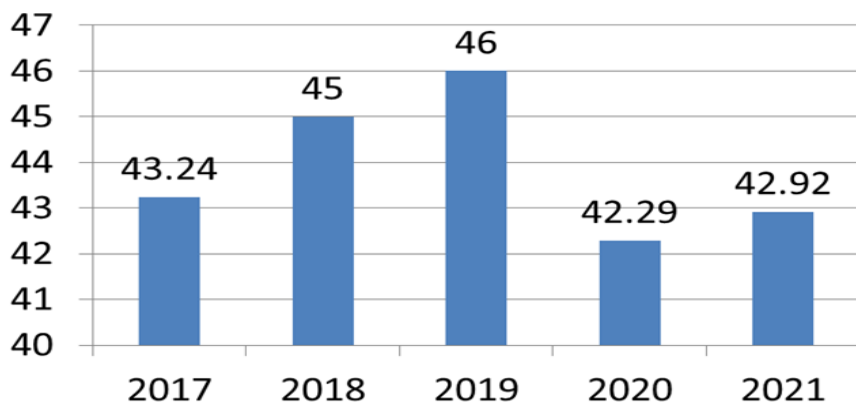


Gambar 40. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
Sumber : DPUP dan ESDM DIY, 2021

h) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah perilaku penting dalam pencegahan penyakit dengan cara memanipulasi (menekan/mengurangi) factor risiko kesehatan. Indikator PHBS antara lain persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI secara eksklusif, penimbangan balita, penggunaan air bersih, cuci tangan, penggunaan jamban, pemberantasan jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, serta tidak merokok di

dalam rumah. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga, capaian penerapan PHBS di DIY tahun 2020 adalah 42%

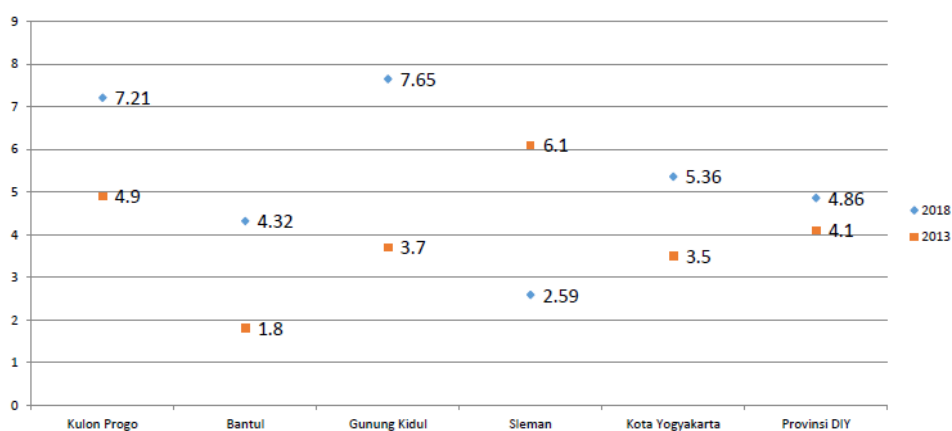


Gambar 41. Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Sumber : Dinkes DIY, 2021

i) Penyakit Tidak Menular

Selain masalah gizi tersebut, prevalensi penyakit tidak menular di DIY relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain. Secara detail survei nasional Riskesdas dapat dilihat pada Gambar berikut:

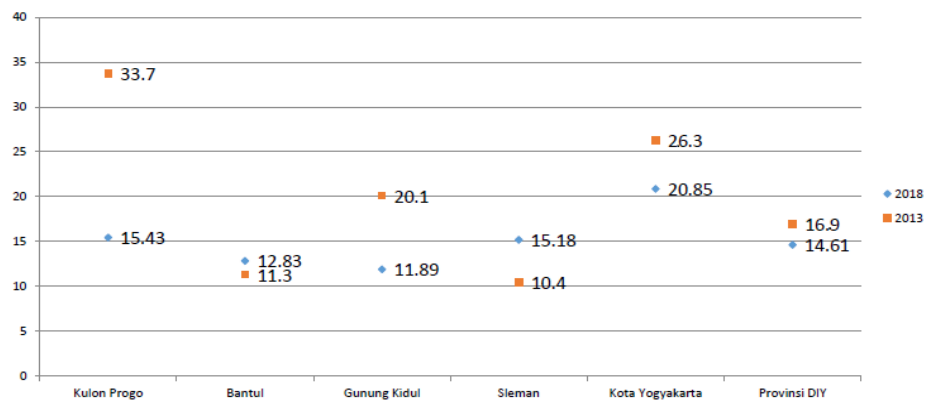
(1) Kanker



- 2013 : wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter (belum ada provinsi Kalimantan Utara)
- 2018 : wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter

Gambar 45. Prevalensi Kanker di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018
Sumber : Dinkes DIY, 2021

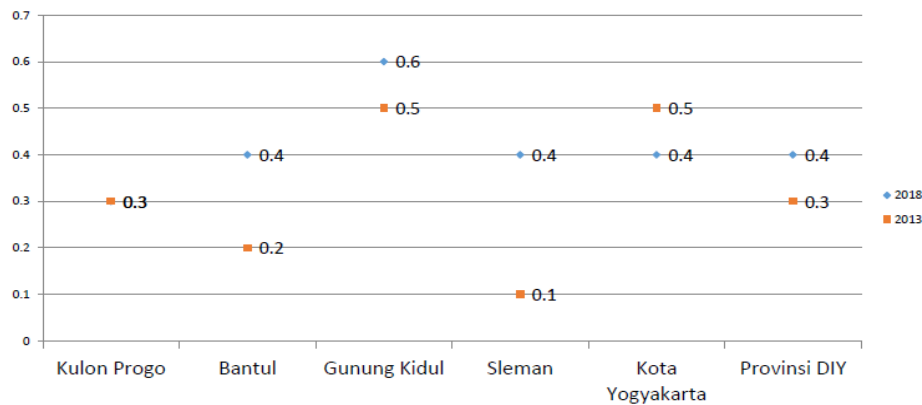
(2) Stroke



- Riskesdas 2013: wawancara berdasarkan diagnosis nakes
- Riskesdas 2018: wawancara berdasarkan diagnosis dokter

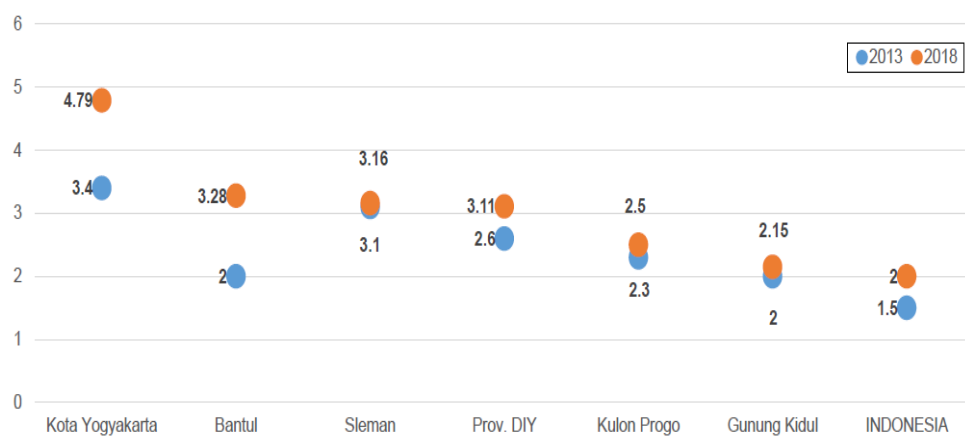
Gambar 46. Prevalensi Stroke di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018
Sumber : Dinkes DIY, 2021

(3) Gagal Ginjal Kronis



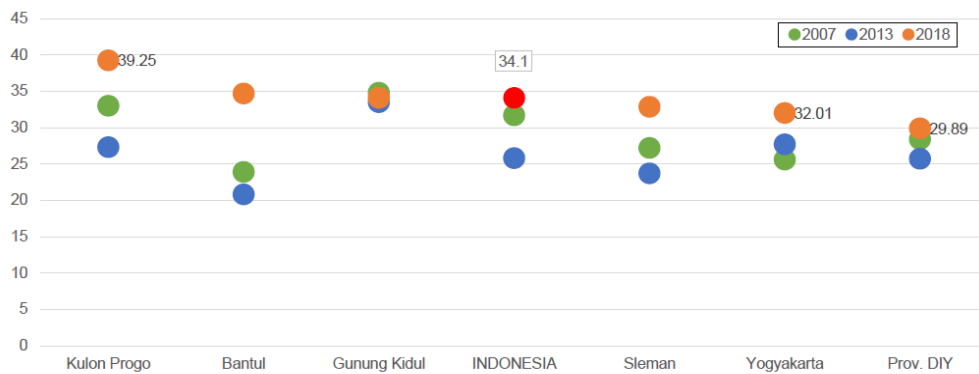
Gambar 47. Prevalensi gagal ginjal kronis di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018
Sumber : Dinkes DIY, 2021

(4) Diabetes Mellitus



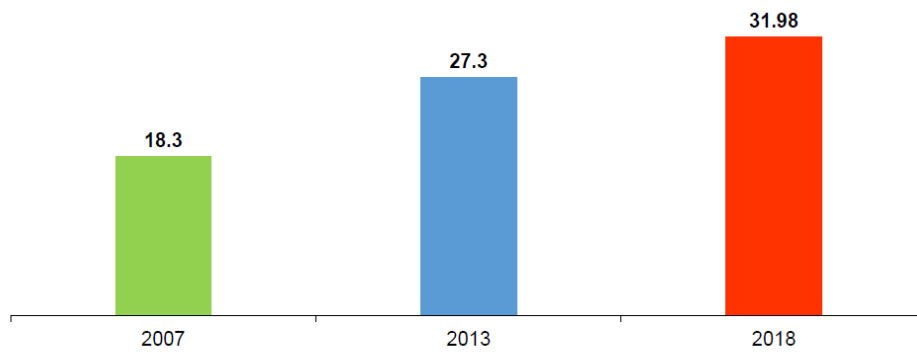
Gambar 48. Prevalensi Penyakit Diabetes Mellitus di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018
Sumber: Dinkes DIY, 2021

(5) Hipertensi



Gambar 49. Prevalensi hipertensi di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018
 Sumber : Dinkes DIY, 2021

(6) Obesitas Sentral



Indikator obesitas sentral, yaitu lingkar perut perempuan > 80 cm dan Laki-laki > 90 cm

Gambar 50. Prevalensi obesitas sentral (>15 tahun) di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018

Sumber : Dinkes DIY, 2021

Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY yang masih relatif tinggi dapat dapat mengindikasikan bahwa pola makan masyarakat DIY banyak yang belum sesuai anjuran. Penelitian Susetyowati (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara frekuensi konsumsi makanan berlemak dengan kejadian tingginya kolesterol dan Low Density Lipoprotein (LDL) atau dikenal dengan lemak jahat; dan juga rendahnya High Density Lipoprotein (HDL) yang dikenal dengan lemak baik. Penelitian Dandamudi dkk. (2018) yang merupakan studi literature yang membahas 17 artikel juga menyatakan bahwa konsumsi lemak jenuh dan makanan atau daging olahan secara konsisten berhubungan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa konsumsi makanan selingan pada waktu makan utama, makan saat tengah malam, kurangnya aktivitas fisik, tingginya asupan makanan cepat saji, dan konsumsi alkohol berkaitan erat dengan kejadian obesitas (Susetyowati, 2019). Penelitian (Syagata, 2019) juga menunjukkan pola konsumsi yang tinggi energi berkaitan dengan risiko Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2) pada pegawai.

j) Dampak pandemic Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat di DIY

Pandemi Covid-19 berdampak pada multisector. Pada sektor ekonomi pandemic menyebabkan pertumbuhan ekonomi DIY turun bahkan minus, refocusing anggaran

untuk pengendalian Covid-19, naiknya angka penangguran, penurunan pendapatan, PHK karyawan serta angka putus sekolah, perceraian dan kekerasan rumah tangga sebagai dampak lanjut dari ekonomi.

B. Hambatan/Permasalahan

1. Ketersediaan Pangan
 - a. Lahan yang rusak, tidak produktif, dan menganggur
 - b. Alih fungsi lahan pertanian
 - c. Kegagalan memenuhi swasembada pangan
 - d. Kegagalan proyek food estate di masa lalu
 - e. Keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan daya beli, sehingga semakin rendah pendapatan akibat kemiskinan akan berdampak pada makin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan.
2. Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - a. pola konsumsi sebagian besar masyarakat DIY masih kurang seimbang, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori, penurunan konsumsi beras yang diiringi dengan peningkatan konsumsi terigu, konsumsi pangan hewani melebihi nilai anjuran, asupan buah-sayur yang kurang, serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji baik di perkotaan maupun perdesaan
 - b. kondisi pangan yang beredar di masyarakat masih belum sepenuhnya terjamin mutu dan keamanannya, di antaranya masih beredarnya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Peredaran makanan berformalin, makanan yang mengandung boraks, penggunaan bahan warna tekstil pada makanan, serta pengawet makanan yang berlebihan masih mungkin terjadi.
3. Gizi dan Kesehatan Masyarakat
 - a. prevalensi penyakit tidak menular di DIY relatif lebih tinggi dibanding rata-rata nasional
 - b. Masalah *triple burden diseases* yang berpotensi pada peningkatan morbiditas dan mortalitas
 - c. Defisiensi mikronutrien tertentu
 - d. Stigma masyarakat terhadap penyakit tertentu sehingga membatasi dukungan kesembuhan pasien/penderita
 - e. Pengetahuan, sikap dan keyakinan masyarakat terhadap kesehatan dan upaya pencarian kesehatan yang belum optimal
 - f. cakupan PHBS belum merata di semua tatanan masyarakat
4. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pangan dan gizi
 - a. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi meningkatkan jumlah penduduk miskin di DIY. Di sisi lain, kemiskinan di suatu wilayah senantiasa beriringan dengan keterjangkauan pangan yang pada gilirannya akan berpotensi menjadi penyebab munculnya kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Lebih jauh, perlu kewaspadaan khusus

jika pandemi Covid 19 berlangsung lebih lama, penduduk miskin akan bertambah dan berisiko masuk ke dalam kelompok rawan pangan.

- b. Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi kendala bagi kegiatan rantai pasok komoditas pangan pokok dan strategis sehingga harga eceran umumnya meningkat. Terganggunya sistem logistik dan distribusi pangan dari produsen ke konsumen telah mendorong pada peningkatan harga beberapa komoditas, termasuk meningkatnya margin pemasaran beberapa kebutuhan pokok. Perubahan pola rantai pasok pangan di tengah pandemi Covid-19 akibat kebijakan Work From Home (WFH) dan karantina wilayah secara parsial. Selama pandemi Covid-19, mulai dari proses produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir, sistem kerja atau moda industri pangan memang mengalami perubahan besar.
- c. Penurunan permintaan mengakibatkan produk petani tidak terserap, terjadi over supply, harga turun, kesejahteraan petani turun, petani akan menurunkan produksi, dan jika tidak teratasi akan terjadi kelangkaan bahan pangan
- d. Perubahan sistem layanan kesehatan masyarakat. Misalnya pemantauan pertumbuhan melalui Posyandu, deteksi dini PTM melalui Pandu PTM dan kegiatan lain yang bersifat UKBM terhambat. Perkembangan/pelayanan dengan metode *telehealth* terbatas pada kalangan yang melek teknologi informasi dan daerah yang lebih maju dengan fasilitas jangkauan internet dan hand phone yang memadai.
- e. gangguan kesehatan mental seperti stress, depresi, cemas
- f. meningkatnya kasus perceraian dan KDRT.

C. Tantangan

1. Rawan bencana
Wilayah DIY termasuk wilayah rawan bencana meliputi: bencana letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, gempa bumi, tsunami, dan abrasi
2. Dampak perubahan iklim
perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, suhu lebih tinggi, dan kenaikan permukaan air laut berdampak serius terhadap sektor pertanian.
3. Transisi demografi pada bidang pertanian.
Usia petani semakin tua sementara pekerja tenaga muda cenderung memilih pekerjaan non pertanian (jasa, perdagangan, dll), yang disertai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian.
4. Transisi gizi
Kemajuan teknologi disertai dengan perubahan preferensi masyarakat pada makanan, termasuk makanan yang siap saji/*fast food* dan mulai meninggalkan makanan tradisional. *Fast food* ini pada umumnya tinggi gula, garam, lemak, natrium yang meningkatkan resiko obesitas dan penyakit tidak menular lainnya.

5. Dari sisi demografi, jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan baik penduduk usia produktif maupun tidak produktif. Tentu hal ini selain berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, juga berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana serta antisipasi kebutuhan layanan yang memadai untuk penduduk usia lanjut.

D. Telaah Kebijakan Provinsi

Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, DIY telah menetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini telah disinkronkan dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039. Namun demikian, Perda PLP2B DIY ini perlu ditindaklanjuti dengan penetapan PLP2B dalam rencana tata ruang kabupaten. Selain itu, perlu juga ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Kepala Daerah mengenai insentif dan disinsentif PLP2B dalam rangka menstimulus pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan.

Berbagai kebijakan yang terkait dengan aspek konsumsi dan keamanan pangan di DIY telah dilaksanakan baik yang berpijak pada perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY sendiri maupun Pemerintah Pusat atau Lembaga terkait. Adapun kebijakan yang dimaksud di antaranya: (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; (2) Perpres No 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (3) Perpres No 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional; (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; (6) SK Gubernur DIY Nomor 201/Kep/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; (7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan; (8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi Dalam Pangan Olahan; (9) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan dan (10) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Dampak positif diharapkan banyak pihak terkait dengan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut di atas. Sebagai contoh implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan telah berdampak positif dengan munculnya berbagai sertifikasi yang terkait dengan pengawalan mutu dan kualitas pangan yang berdar di DIY. Fakta yang di

dapat di lapangan sampai dengan saat ini sudah dibentuk OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) DIY yang merupakan lembaga non struktural yang berada di dalam instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY serta memiliki tugas menjamin keamanan pangan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah DIY.

Terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di dukung kebijakan khusus Gubernur mengenai Program Desa Percontohan Pengurangan Kerawanan Pangan dan Kemiskinan di DIY sudah berdampak nyata pada pengurangan desa rawan pangan di DIY, terbukti di tahun 2016 dijumpai 16 desa rawan pangan berkurang secara signifikan menjadi 4 desa di tahun 2020.

Kebijakan yang berbasis pada beberapa peraturan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi Dalam Pangan Olahan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemar Kimia dalam Pangan Olahan; dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penjaminan keamanan pangan di DIY.

Sementara itu, telah diterbitkan pula berbagai kebijakan terkait pembangunan gizi dan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari. Kegiatan utama GERMAS nomor 3 adalah penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yang berkaitan dengan penyusunan RAD Pangan dan Gizi.
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

III. RENCANA AKSI MULTI SEKTOR

A. Tujuan dan Sasaran (outcome)

Outcome yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 12. Outcome RAD-PG DIY Tahun 2021-2024

No	Indikator	Baseline (2020)	Target				Instansi Penanggung-jawab
			2021	2022	2023	2024	
<i>Outcome Antara</i>							
1	Ketersediaan Beras (ton)	535.940	535.940	535.940	535.940	535.940	DPKP
2	Ketersediaan Pangan Hewani (ton)	438,189	438,189	438,189	438,189	438,189	DPKP
3	Skor Pola Pangan Harapan	94,7	94,8	95,00	95,10	95,20	DPKP
4	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735	DPKP
5	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	107,97	107,97	107,97	107,97	107,97	DPKP
6	Jumlah desa rawan pangan (desa)	4	4	4	3	3	DPKP
7	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	31,24	32,70	33,25	33,80	34,36	DKP
8	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	17,8	17,7	17,5	17,4	17,2	DPKP
9	Konsumsi telur dan susu (gram/kapita/hari)	31,8	31,5	31,3	31,0	30,7	DPKP
10	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	249,2	249,3	249,4	249,6	249,7	DPKP
11	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	78	80	82	84	86	BPOM
<i>Outcome</i>							

No	Indikator	Baseline (2020)	Target				Instansi Penanggung-jawab
			2021	2022	2023	2024	
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,4	21,1	18,4	16	14	Dinkes
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	8,4	7,8	7,5	7,3	7	Dinkes

B. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

1) Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat

a) Kebijakan terkait ketersediaan pangan dan akses pangan

Selain upaya meningkatkan produksi pangan dengan memperhatikan pemilihan kualitas bibit, meningkatkan daya guna lahan, dan meningkatkan kapasitas petani, pemerintah juga mempromosikan kebijakan pemanfaatan taman pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pada masa pandemi covid-19 campur tangan pemerintah dalam melakukan intervensi pada input produksi pertanian yang memiliki kontribusi relatif besar, seperti kebijakan tentang harga pupuk, benih unggul, dan pestisida serta memberikan kebijakan insentif untuk keberlangsungan usaha produsen pangan. Intervensi lain yang mungkin dilakukan adalah memberikan program pinjaman tanpa agunan untuk petani dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, pemerintah perlu memastikan program stimulus sektor pertanian dapat berjalan dan untuk memastikan budi daya prioritas dapat berjalan pada musim tanam berikutnya (TNP2K, 2020).

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam merespon situasi kegawatdaruratan antara lain:

- Mengembangkan *integrated farming*
- Menggalakkan pertanian modern (traktor, cultivator, drone, irigasi tetes dll)
- Meningkatkan pemasaran dengan sistem online atau marketplace
- Melakukan Asuransi tani
- Meningkatkan cadangan pangan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan bencana dan kegawatdaruratan
- Penguatan pengendalian *food waste* dan *food loss* dalam rantai pasok pangan
- Melakukan koordinasi, kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, swasta, keraton, masyarakat

- Memberikan insentif untuk sektor logistik dalam rantai pasok pangan agar distribusi pangan terjamin serta ketersediaan dan stabilitas harga pangan tetap terjaga.

b) Kebijakan terkait gizi dan kesehatan masyarakat

- menyosialisasikan pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana
- melakukan pengkajian cepat atau Rapid Health Assessment (RHA)-Gizi
- menyediakan buffer stock MP-ASI, PMT Bumil, dan PMT Anak Sekolah
- menyusun menu dan merencanakan kebutuhan bahan makanan dapur umum
- menyusun menu dan merencanakan kebutuhan bahan makanan untuk kelompok rentan
- menyelenggarakan dapur khusus bayi dan anak balita darurat
- melakukan konseling menyusui, MP-ASI, dan PMBA
- surveilans Gizi
- melakukan pengawasan bantuan susu formula, kental manis, dan produk bayi lainnya
- melakukan pengawasan donasi dan bantuan pangan lainnya
- membuat standar porsi dan gizi pengungsi
- mobilisasi sumber daya untuk menunjang kegiatan sub klaster gizi

2) Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan Gender sangat berperan dalam hal ketersediaan pangan dan gizi.

Beban ganda perempuan pekerja dan belum setaranya proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi masalah gender yang mengedepan. Namun demikian di lain sisi peran yang dilekatkan kepada perempuan sebagai penanggungjawab urusan domestik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian keluarga (termasuk kebutuhan pangan) dan pengasuhan anak menempatkan posisi dan peran perempuan menjadi sangat penting di suatu keluarga. Penguatan fungsi keluarga didorong untuk membangun relasi yang setara baik laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sebagai fondasi membangun norma adil gender di masyarakat. Penguatan fungsi keluarga dibarengi dengan pendidikan kesetaraan gender bagi keluarga melalui kelembagaan yang sudah ada seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), keluarga sadar gender, Dasa wisma, PKK, desa prima, P2WKSS, dan sebagainya.

Dalam bidang ketahanan pangan dan gizi, pengarusutamaan gender dapat berupa memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dan peran, memilih bidang

pekerjaan yang sesuai sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam keluarga merupakan potensi peluang yang baik untuk dapat menyiapkan gizi bagi keluarganya melalui pemanfaatan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, peningkatan ketrampilan untuk mengelola gizi, kesehatan maupun kebutuhan lain yang mendukung terciptanya kesejahteraan keluarga.

IV. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. Strategi Dan Aksi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun strategis dan aksi di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Tabel 13).

Tabel 13. Strategi dan Aksi Rencana Aksi

No	Strategi	Aksi
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
		Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan

No	Strategi	Aksi
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan
		Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
		Melakukan pendampingan pemanfaatan limbah olahan makanan
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditas pangan
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan dilaporkan
		Meningkatkan jenis komoditas pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditas yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik	Membina UMKM dan Koperasi Pertanian dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan pangan

No	Strategi	Aksi
	Desa (BUMDes) di bidang pangan;	
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	<p>Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)</p> <p>Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT</p> <p>Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)</p> <p>Melakukan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor KB Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Lestari MKJP</p>
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	<p>Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting</p> <p>Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi</p>
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	<p>Meningkatkan kegiatan advokasi panganekaragaman konsumsi pangan</p> <p>Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i>, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku</p>

No	Strategi	Aksi
		<p>Melakukan pengutamaan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)</p> <p>Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan</p> <p>Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik</p> <p>Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90</p> <p>Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan</p> <p>Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)</p>
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	<p>Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan</p> <p>Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah</p>
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	<p>Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal</p>
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan

No	Strategi	Aksi
		<p>kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 pada tahun 2024</p> <p>Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat</p> <p>Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandua) PTM</p> <p>Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa</p> <p>Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19</p> <p>Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i></p> <p>Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat</p> <p>Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak</p>
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	<p>Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi</p> <p>Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku</p>
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	<p>Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i></p> <p>Memperkuat peran Pemda DIY dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Kabupaten/Kota</p>
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	<p>Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di daerah</p> <p>Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan, dan masyarakat untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan</p>

No	Strategi	Aksi
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	<p>perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i>.</p> <p>Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di daerah</p> <p>Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga</p> <p>Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku</p>
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	<p>Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</p> <p>Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i>, harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi</p>
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	<p>Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i></p> <p>Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting pada perguruan tinggi di DIY</p> <p>Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro</p> <p>Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditas pangan</p> <p>Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga</p> <p>Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar</p>

B. Pengorganisasian

Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di DIY akan dilaksanakan secara *collaborative actions* dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG

merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pemerintah daerah membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi, antara lain: Perguruan Tinggi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat umum.

C. Peran Sektor Non-Pemerintah (Swasta dan Lembaga Masyarakat)

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga berperan untuk melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi. Sektor non pemerintah dan lembaga masyarakat yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media.

Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebarluasan informasi pangan dan gizi terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan, saat proses belajar di dalam kelas. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standardisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Peran yang dapat diambil oleh mitra pembangunan adalah untuk meningkatkan pelaksanaan melalui pembentukan *pilot project* yang akan dijadikan sebagai best practice untuk direplikasi. Selain itu mitra pembangunan juga dapat memberikan bantuan teknis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya.

Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan makanan bergizi yang terjangkau masih sangat sedikit. Di satu sisi, di perkotaan sangat mudah ditemui makanan bergizi untuk anak, namun bagi populasi di pedesaan dengan kuintil kepemilikan rendah tidak ditemukan hal yang sama. Sektor swasta sering kali tidak memilih lokasi dengan tingkat permintaan yang rendah sehingga tidak menyediakan bahan makanan ke lokasi tersebut, sehingga mengakibatkan tidak adanya makanan anak yang berkualitas bagi penduduk yang rentan tersebut. Selain rendahnya permintaan, biaya yang dikeluarkan untuk distribusi sering kali lebih besar

ditambah daya beli masyarakatnya rendah, sehingga sektor swasta semakin tidak tertarik untuk menyediakan makanan ke daerah tersebut, walaupun dilakukannya sulit lagi terjangkau. Dengan demikian sektor swasta dapat berperan untuk menyediakan kesempatan untuk membuat makanan bergizi yang terjangkau dan mendorong karyawannya untuk menerapkan pola hidup sehat.

D. Pembiayaan

Penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dapat diketahui lebih awal dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber lainnya. Besaran dana indikatif untuk program dan kegiatan terdapat pada RPJMD, Renstra OPD, serta rencana pendanaan sumber lain.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG dilakukan terhadap Strategi, Aksi, dan capaian indikatornya beserta proses pelaksanaannya. Capaian kinerja indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD- PG 2020-2024.

B. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun melalui koordinasi yang difasilitasi oleh BAPPEDA.

C. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan dilakukan oleh masing-masing OPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah:

1. Indikator dan capaian masing-masing OPD dan lembaga terkait dalam mendukung strategi dan aksi
2. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya
3. Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia*.
- BPS (2020). Indikator kesejahteraan rakyat 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *DIY Dalam Angka Tahun 2021*.
- Gropper, Sareen S. Smith, J. L. (2013). Advanced Nutrition and Human Metabolism. In *Advanced Nutrition in Human*.
- Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Peraturan Gubernur tentang RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Gizi Seimbang. In *Pedoman Gizi Seimbang*.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari*. 1–26.
- Sugianto, Faozan, M., & Setyani, A. (2014). *Studi diet total: Survei Konsumsi Makanan Individu Daerah Istimewa Yogyakarta 2014*. 1–74.
http://www.pusat2.litbang.depkes.go.id/pusat2_v1/wp-content/uploads/2015/04/Buku-Studi-Diet-Total-Survei-Konsumsi-Makanan-Individu-DIY-2014.pdf
- Utama, P. (2020). Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19.

Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi tahun 2020-2024

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman													
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Luas sentra produksi pangan lokal (tanaman pangan) Budidaya Ubikayu, Budidaya Garut	Ha	300	350	375	400	73,570	85,166	85,166	85,166	DPKP
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hewani (ternak)	lokasi	4	4	4	4	10.538	18.357	19.991	21.790	DPKP
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hortikultura (Sayur dan buah)	lokasi	20	22	24	26	493	308	465,6	504,4	DPKP
				lokasi (salak dan bawang merah)	3	3	3	3	450	450	450	450	BPTP
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok hewani (ikan)	lokasi	49	49	49	49	3.248,8	2.306,7	2.350	2.400	DKP
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	persen	0,50	0,52	0,54	0,57	7.761,4	3,180,1	3.250	3.300	DKP
			Persentase kenaikan produksi sayur	persen	4	4	4	4	24,7	14	19,4	19,4	DPKP
			Persentase kenaikan produksi buah	persen	4	4	4	4	24,7	14	19,4	19,4	
			Persentase kenaikan produksi daging ternak (daging sapi, daging ayam)	persen	0,25	0,26	0,27	0,28	7.826	13.513	14.864	16.351	
			Persentase kenaikan produksi telur	persen	3,28	3,29	3,30	3,31	550	690	759	835	
			Persentase kenaikan produksi susu	persen	0,38	0,39	0,40	0,41	141	2.132	2.345	2.580	
			Persentase kenaikan produksi tanaman pangan (beras, ubi kayu, ubi	persen	1	1	1	1	17,8	17,9	18,1	18,2	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			jalar, sorghum, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau)										
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Persentase desa/kelurahan fokus lokasi penurunan stunting yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan.	Persen (dari 40 lokus di DIY)	25	25	25	25	246,5	140	194	194	DPKP
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan membangun demplot urban farming	Persen (dari 10 lokus di Kota Yk)	50	50	50	50	205,8	205,8	205,8	205,8	DPKP
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Jumlah kab/kota yang melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebun bibit daerah (KBD) secara konsisten untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan.	Kab/Kota	5	5	5	5	50	50	50	50	DPKP
									50	50	50	50	BPTP
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan di desa lokus penurunan <i>stunting</i> atau menerapkan <i>urban farming</i> .	KWT	10	10	10	10	246,5	140	194	194	DPKP
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Jumlah kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/kota dan memiliki program Pengawasan Keamanan Pangan Daerah di <i>retailer</i> dan pasar tradisional	Kab/kota	3	2	1	1	45	30	15	15	BPPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Jumlah desa/kelurahan yang menerima intervensi program desa pangan aman	Desa	8	7	8	7	602,9	663,2	729,5	802,4	BPPOM
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	80	80,1	80,2	80,3	140	140	140	140	DPKP
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Persentase pangan segar asal hewan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	80	81	82	83	60	63	65	70	DPKP
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Persentase pangan segar asal ikan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	78	78	79	79	24	25	30	35	DKP
		Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan	Jumlah industri olahan pangan skala kecil/UMKM yang mendapatkan pelatihan dalam rangka menjamin keamanan pangan	UKM	465	300	300	300	426,25	275	275	275	Diskop dan UKM
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat,	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota	Persentase kenaikan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	20	20	20	20	124,25	136,675	149,1	161,525	DPKP
			Persentase kenaikan cadangan pangan masyarakat	persen	10	10	10	10	47,050	51,75	56,45	61,15	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	pemerintah daerah, dan masyarakat	Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Persentase desa waspada dan rawan pangan yang mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	persen	0	0	30	30	0	0	600	600	DPKP
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi untuk mengurangi <i>food loss</i> /kehilangan hasil saat panen	kelompok			5	5			100	100	DPKP
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi untuk mengakses informasi mengenai harga komoditas pangan	Paket data	3	3	3	3	150	155	160	165	DPKP
			Jumlah penyuluh yang mendapatkan pendampingan/ sosialisasi kalender tanam	lokasi BPP	2	2	2	2	50	50	50	50	BPTP
		Melakukan pendampingan pemanfaatan limbah olahan makanan	Jumlah industri olahan pangan skala kecil/UMKM yang mendapatkan pelatihan inovasi produk pangan yang beragam dalam rangka pengendalian <i>food loss</i>	UMKM	-	30	30	30		42,5	42,5	42,5	Diskop dan UKM
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Tersedianya data <i>food loss</i> (pangan tercecer) setiap tahun	persen	100	100	100	100	25	25	30	30	DPKP
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah komoditi pangan pokok (selain padi) yang diberikan biofortifikasi	Purwarupa produk		1	1	1		100	100	100	LIPI

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman													
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Jumlah operasi pasar yang dilakukan untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga	kali	beras: 3 kali komo ditas lain: 2 kali	beras: 3 kali komo ditas lain: 2 kali	beras: 3 kali komo ditas lain: 2 kali	beras: 3 kali komo ditas lain: 2 kali	63,9	37,9	70	70	Disperinda g
			Jumlah lembaga Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang difasilitasi untuk stabilisasi harga	Gapoktan/k elompok	46	48	50	52	900	1000	1100	1200	DPKP
			Jumlah gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog	kali	25	28	30	30	75	84	90	90	Bulog
			Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen	kali	12	12	12	12	63,9	63,9	63,9	63,9	Disperinda g
			Persentase kabupaten/kota yang memiliki sistem informasi pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis	persen	100	100	100	100	127,8	51,6	56,8	62,5	Disperinda g
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah	Jumlah Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (PMT) yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal	Toko	230	235	240	245	362,5	398,75	435	471,25	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		(kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Jumlah Rumah Pangan Kita yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal	RPK	40	40	50	50	2.340	2.574	2.831	3.114	Bulog
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan daerah	persen	100	100	100	100	197,78	217,56	237,34	257,12	DPKP
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Jumlah komoditas pangan pokok/strategis sayur dan buah yang dipantau dalam sistem informasi harga pangan	Komoditas	12	12	12	12	161,75	273,32	289,52	305,72	DPKP
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM dan Koperasi Pertanian dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan pangan	Persentase UMKM/Koperasi sektor pangan yang dibina untuk menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan untuk keperluan masyarakat	Koperasi	-	20	20	20	-	25	25	25	Diskop
2.4	Pengembangan sistem jaringan pengaman sosial pangan dengan	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Jumlah beras fortifikasi atau biofortifikasi yang tersedia sebagai salah satu bahan pangan untuk program BPNT	Kg	3.222.8.910	3.228.910	3.228.910	3.228.910	26.799	26.799	26.799	26.799	Dinsos

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT	Jumlah e-warong yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum	e-warong	1.264	1.264	1.264	1.264	773.493	773.493	773.493	773.493	Dinsos
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Jumlah e-warong yang menyediakan suplemen gizi dalam program bantuan sosial untuk kelompok marginal (perempuan, gelandangan, fakir miskin, anak jalanan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	e-warong	1.264	1.264	1.264	1.264	773.493	773.493	773.493	773.493	Dinsos
		Melakukan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor KB Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Lestari MKJP	Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan dan atau di Kampung Percontohan Lain yang mendapat fasilitasi dan pembinaan PEK	kelompok	5	10	15	20	100	125	150	175	BKKBN
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Persentase Kab/Kota penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyerap produk pangan yang berasal dari dalam DIY	persen	100	100	100	100	99,5	109,5	120,4	132,4	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting	Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk Tikar Pertumbuhan sebagai media edukasi dan deteksi dini stunting	persen	71,42	71,94	72,96	73,98	4	4	5	5	Biro Bermas (indikator dalam Pergub 92/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting DIY Tahun 2020 – 2024)
			Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi baduta dan balita	persen	48,21	48,98	49,74	51,02					
		Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Persentase desa mandiri pangan dalam tahap kemandirian	persen	75	76	77	78	80	80	90	90	
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Tersedianya sistem informasi ketersediaan dan harga pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan	Sistem informasi		1				95			Biro APSDA
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)													

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sitem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan analisis dan memanfaatkan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kab/Kota	5	5	5	5	80	80	80	80	DPKP
			Jumlah kab/kota yang menyediakan dan menggunakan data skor PPH ketersediaan	Kab/Kota	5	5	5	5	27,5	27,5	27,5	27,5	DPKP
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan ketahanan pangan di kabupaten/kota	Kab/Kota	100	100	100	100	28,46	28,46	28,46	28,46	DPKP
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Lokasi	5	5	5	5	50	50	50	50	DPKP
		Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat/agama/politik/ selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Jumlah kampanye digital yang dilakukan <i>influencer</i> /tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk perubahan perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Kali	1	1	1	1	20	20	20	20	DPKP
			Jumlah lokasi sosialisasi perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Lokasi	5	5	5	5	50	50	50	50	DPKP
		Melakukan pengutamaan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Jumlah orang yang mengikuti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	orang	3.390	2.580	3.450	3.450	732,9	829,9	850	875	DKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pengolahan ikan	orang	1.925	1.250	2.500	2.500	481,2	634,2	650	675	DKP
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan	Jumlah guru SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan pelatihan integrasi pedoman gizi dan pangan	orang		150	300	300		175	350	375	Dikpora
			Jumlah sekolah yang menerapkan pedoman gizi dan pangan dalam pengelolaan kantin sekolah	sekolah		27	77	127		75	85	95	Dikpora
			Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terintegrasi dengan UKS, sekolah Adiwiyata, dan sekolah ramah anak (mengintegrasikan materi kependudukan dengan mata pelajaran)	SSK	25	30	35	40	105	122,5	140	157,5	BKKBN
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Jumlah kampanye gizi seimbang di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi	kali	10	15	17	20	5	30	30	30	Dinkes
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90	Jumlah petugas kesehatan yang pernah mendapat pelatihan/pendampingan komunikasi perubahan perilaku antar individu.	orang	7	16	25	35	5	37,5	37,5	37,5	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Anak (BKB) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	125	230	330	438	125	150	175	200	BKKBN
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	125	230	330	438	125	150	175	200	BKKBN
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	125	230	330	438	125	150	175	200	BKKBN
			Jumlah Kelompok Pusat Infomasi dan Konseling Remaja (PIKR) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	78	156	234	312	100	125	150	175	BKKBN
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melau pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah kampanye yang melibatkan lintas sektor dan mitra kesehatan dalam rangka pengendalian faktor risiko PTM melau pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini.	kali	10	15	17	20	30	30	30	30	Dinkes
		Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah orang yang sudah mengikuti orientasi <i>agent of change</i> PTM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik.	orang	0	20	40	60	0	45	45	45	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan	Jumlah UMKM yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) dalam label kemasan sesuai peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM.	UMKM	20	20	20	20	27,5	27,5	27,5	27,5	Diskop dan UKM
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah	24	20	22	20	75,4	82,9	91,2	100,2	BBPOM
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral	Jumlah siswa SLB yang mendapatkan makanan tambahan sehat dalam rangka pembiasaan mengkonsumsi makanan sehat	orang	1435	1445	1455	1460	625	675	725	775	Dikpora

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kabupaten/Kota	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	persen	45	50	55	60	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	persen	40	45	50	55	3	3	3	3	Dinkes
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Cakupan Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan	persen	85	85	85	85	629	630	635	640	Dinkes
			Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	persen	80	80	80	80	1.819	1.850	1.855	1.860	Dinkes
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 pada tahun 2024	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A.	persen	87	88	89	90	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	persen	81	82	83	84	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	persen	52	54	56	58	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A	persen	73	76	76	79	3	3	3	3	Dinkes
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Penyusunan SOP tata kelola pelayanan gizi dalam situasi darurat	dokumen	2	3	4	5	3	3	3	3	Dinkes
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Panduan) PTM	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM sesuai standar (Puskesmas melakukan tatalaksana panduan PTM berdasarkan algoritma panduan PTM dan	persen	20	40	60	80	45	45	45	45	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Puskesmas melakukan pendampingan saat pelaksanaan Posbindu)										
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Persentase kabupaten/kota yang puskesmasnya melakukan pendampingan desa untuk kegiatan Posbindu	persen	25	50	75	80	2,5	15	15	15	Dinkes
			Persentase obesitas usia \geq 15 tahun yang dilaksanakan pengukuran deteksi dini PTM	persen	10	25	30	50	2,5	15	15	15	Dinkes
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19	Jumlah kegiatan sosialisasi/ pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif pada perusahaan/sektor swasta	kegiatan	21	25	25	25	3	3	3	3	Dinkes
		Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	Jumlah pelatihan pengelolaan sampah organik mandiri bagi masyarakat	Kali	20	5	5	5	198,66 0	995,1 78	1.250	1.750	DLHK
			Sosialisasi pengurangan sampah (Gerakan bersih sungai)	Kali	0	9	10	15					
			Pembinaan pengelolaan sampah kabupaten/kota	Kab/kota	5	5	5	5					
		Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat	Persentase Kalurahan/kelurahan yang telah mengimplementasikan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	persen	41	41.5	42	42.5	3	3	3	3	Dinkes
			Jumlah Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	sekolah	2365	2958	2958	2958	3,2	3,2	3,2	3,2	Dinkes
			Jumlah Kelompok Masyarakat penerima bantuan Hibah Sarana	Kelompok Masyarakat	5	5	5	5	1.000	1.000	1.000	1.000	DPUP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Prasarana Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan										
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditingkatkan kualitasnya	persen	43,10	53,78	64,46	75,14	68.895	65.884	70.000	70.000	DPUP
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh Tim Penggerak PKK	Desa/ Kelurahan	91	93	95	97	5	5	5	5	PKK/ Biro Bermas (indikator dalam Pergub 92/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting DIY Tahun 2020 – 2024)
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai	Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi	Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan pengawasan terhadap NSPK SNI wajib tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi	Kab/kota	5	5	5	5	6,8	11,2	15	15	Disperindag
		Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Persentase produk minyak goreng sawit terdaftar yang beredar dan mengandung vit A dan/ atau pro Vitamin A	persen	100	100	100	100	2,4	2,6	2,8	3	BPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	pengayaan nilai gizi		Persentase tepung terigu terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan	persen	100	100	100	100	2,4	2,6	2,8	3	BPOM
			Persentase garam konsumsi terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan	persen	72	80	90	95	2,4	2,6	2,8	3	BPOM
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat	Jumlah unit usaha teregister PD, PH dan tersertifikat prima	Unit	5	5	5	5	70	70	70	70	DPKP
			Jumlah unit usaha tersertifikat MD	UMKM	30	30	30	30	80	100	100	120	BBPOM
			Jumlah sertifikat/izin terkait keamanan pangan bagi UMKM produk olahan pangan yang mendapatkan fasilitasi perizinan dari instansi terkait	Sertifikat/izin PIRT	90	90	90	90	90	90	90	90	Diskop dan UKM
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi													
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i> Memperkuat peran Pemda DIY dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor/pemangku kepentingan	kegiatan	1	1	1	1	5,9	3,8	5	5	Bappeda
			Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini	persen		60	100						Bappeda

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi.	kegiatan	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan, serta masyarakat untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku mengenai penyediaan pangan rumah tangga, konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> , serta kesehatan lingkungan.	Jumlah lokasi pelatihan/ pendampingan bagi masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan/swasta meliputi: - Pelatihan kader dalam program sosial - Pelatihan tentang kesehatan dan gizi serta perilaku hidup bersih dan sehat - Pelatihan tentang pengelolaan lahan pekarangan - pemeliharaan sarana sanitasi di masyarakat - pembangunan demplot kebun gizi	kelurahan/ kecamatan lokasi Program Bunda Mengajar	3 kelura han	6 kelura han	1 keca matan	2 kecama tan					Perusahaan Swasta (PT. SGM)
		Jumlah lokasi pelatihan/ pendampingan bagi guru dan orangtua siswa yang dilakukan oleh perusahaan/swasta meliputi: - TOT edukasi bagi Guru PAUD tentang kesehatan dan gizi seimbang, pola asuh dan pengelolaan sampah - Kelas parenting/edukasi pola asuh kepada orang tua siswa	Kabupaten/ kota lokasi Program Isi Piringku untuk Anak Usia 4-6 Tahun	1 kab dan 1 kota	2 kab	2 kab	2 kab					Perusahaan Swasta (PT. SGM)	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			- Mengintegrasikan buku panduan Isi Piringku ke dalam silabus rencana pembelajaran di PAUD										
			Jumlah lokasi pelatihan/pendampingan bagi ibu hamil dan keluarga baduta yang dilakukan oleh perusahaan/swasta meliputi: - Workshop - pemantauan status kesehatan dan status gizi - pengadaan alat edukasi - home visit dan konseling Gizi	kelurahan/ kecamatan lokasi Program 1000 Pelangi Goes to Community	3 kelura han	1 keca matan	1 keca matan	1 kecama tan					Perusahaan Swasta (PT. SGM)
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan sampah	Usaha/ Kegiatan	0	10	15	20	0	995,1 78	1.250	1.375	DLHK
			Edukasi masyarakat terkait penyiapan makanan, penyimpanan makanan, pengaturan porsi makan dan pengelolaan <i>food waste</i> sesuai kaidah keamanan dan mutu pangan	Kab/Kota	5	5	5	5	50	60	60	60	DPKP
			Kampanye menghargai pangan dengan budaya	Kab/Kota	5	5	5	5	50	60	60	60	DPKP
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di daerah	Jumlah pendampingan/pelatihan PUG/PURG bagi OPD bidang ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan	OPD/Instansi	20	20	34	34	20	20	30	30	DP3AP2
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah pendampingan terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	lembaga	4	4	4	4	40	40	50	50	DP3AP2

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Jumlah organisasi perempuan (kabupaten/kota) yang mendapatkan pelatihan dalam implementasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM	Organisasi	1	2	3	4	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Evaluasi terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku dengan melibatkan organisasi perempuan, organisasi masyarakat dan media	Kali	1	2	2	2	0,75	3,1	3,1	3,1	Biro Bina Mental Spiritual
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah kabupaten yang menetapkan Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kabupaten		4			1				DPKP
			Jumlah kabupaten yang menetapkan regulasi turunan dari Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kabupaten			4			1			DPKP
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Jumlah publikasi penelitian mengenai produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	buah	2	2	2	2	150	150	150	150	LIPI

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>	Jumlah publikasi penelitian mengenai inovasi <i>smart farming</i> dalam mencegah <i>food loss</i> yang dapat diadopsi menjadi program pemerintah	buah	1	1	1	1	100	100	100	100	LIPI
			Kajian pencegahan serta penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i>	paket		1				100			DPKP
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberian suplementasi zat gizi mikro	dokumen	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah publikasi riset ilmiah biofortifikasi di berbagai komoditi pangan (selain padi)	buah	1	2	2	2	75	150	150	150	LIPI
		Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah hasil riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	buah	1	1	2	2	100	100	200	200	LIPI
			Jumlah publikasi riset ilmiah untuk mendukung produksi RUTF dalam negeri berbahan dasar lokal	buah	1	1	2	2	100	100	200	200	LIPI

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar	Jumlah kegiatan diseminasi/ekspose hasil penelitian gizi dan kesehatan	kegiatan	1	1	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006